



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEBERDAYAAN SOSIAL**

**PEMBIMBING :  
Dr. Decky Irianti, MP**

**Oleh :  
Nurul Ainin La Dacing  
20.03.107**

**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BANDUNG  
2023**

# LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN SOSIAL DI KELURAHAN  
SUKAPURA, KECAMATAN KIARACONDONG, KOTA  
BANDUNG.

Nama Mahasiswa : Nurul Ainin La Dacing  
NRP : 20.03.107  
Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial  
Program Sarjana Terapan

## Pembimbing


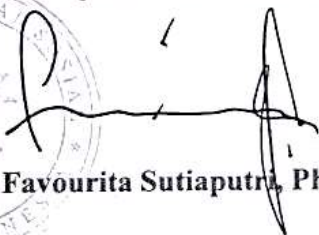


**Dr. Decky Irianti, MP**

## Mengetahui

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana  
Terapan**

**Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung**



**Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia nikmat-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan dengan judul “Laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial”.

Laporan ini disusun dari hasil kegiatan praktikum laboratorium yang dimulai pada tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 yang berisi proses kegiatan praktikum dari tahap insiasi sosial sampai dengan penyusunan rencana intervensi sesuai dengan 5 profil program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial yaitu analisis jaminan sosial, analisis sumber daya bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, serta analisis penanggulangan bencana.

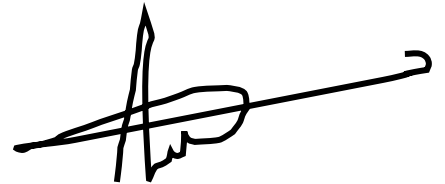
Selesainya penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan doa berbagai pihak. Pada kesempatan ini, praktikan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
2. Ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
3. Ibu Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
4. Ibu Decky Irianti, MP selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada praktikan;
5. Pemari dalam pembekalan profil lulusanyang telah memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai setiap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
6. Teman -teman kelompok 6 Praktikum Laboratorium yang telah bekerjasama dan saling membantu serta mendukung satu sama lain selama kegiatan Praktikum Laboratorium berlangsung;
7. Orang tua dan keluarga atas dukungan, semangat, dan doa untuk kesuksesan praktikan selama menjalani Praktikum Laboratorium
8. Seluruh masyarakat Kelurahan Sukapura yang telah memberikan dukungan dan menerima praktikan dengan sangat baik selama praktikum

Praktikan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan praktikum laboratorium kali ini. Oleh sebab itu, dimohon kepada pembaca agar dapat memberikan saran serta masukan dalam rangka adanya perbaikan guna penyusunan laporan praktikum selanjutnya.

Praktikan berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi praktikan khususnya. Atas bantuan dan bimbingan dari segala pihak, praktikan ucapkan terimakasih.

Bandung, 15 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line that ends in a small hook.

Nurul Ainin

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Tujuan dan Manfaat Praktikum .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Waktu dan Lokasi Praktikum .....</b>	<b>5</b>
D. Proses Praktikum .....	6
<b>II. PRAKTIKUM LABORATORIUM .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Analisis Jaminan Sosial.....</b>	<b>27</b>
<b>1. Gambaran Masalah .....</b>	<b>27</b>
<b>2. Tinjauan Konsep.....</b>	<b>28</b>
<b>3. Asesmen.....</b>	<b>31</b>
a. Identifikasi Masalah .....	31
b. Identifikasi Kebutuhan.....	35
d. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.....	35
4. Rencana Intervensi.....	36
a. Latar Belakang.....	36
b. Tujuan Umum dan Khusus.....	36
c. Bentuk Kegiatan dan Program.....	37
d. Sistem Partisipan .....	38
e. Metode dan Teknik .....	39
f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan .....	39
g. Analisis Kelayakan Program .....	40
h. Jadwal dan Langkah-Langkah.....	42
<b>B. Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....</b>	<b>43</b>
<b>1. Gambaran Masalah .....</b>	<b>43</b>
<b>2. Tinjauan Konsep.....</b>	<b>43</b>
<b>3. Asesmen.....</b>	<b>46</b>
a. Identifikasi Masalah .....	46
b. Identifikasi Kebutuhan.....	48
c. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.....	48
4. Rencana Intervensi.....	49

a.	Latar Belakang.....	49
b.	Tujuan Umum dan Khusus.....	49
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	49
d.	Sistem Partisipan .....	51
e.	Metode dan Teknik.....	52
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan .....	53
g.	Analisis Kelayakan Program .....	53
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah.....	55
<b>C.</b>	<b>Analisis Pemberdayaan .....</b>	<b>56</b>
1.	Gambaran Masalah .....	56
2.	Tinjauan Konsep.....	57
a.	Pemberdayaan Sosial.....	57
b.	Home Industri .....	58
c.	UMKM.....	59
d.	Sumber Daya Manusia (SDM).....	59
3.	Assesmen.....	60
a.	Identifikasi Masalah .....	60
b.	Identifikasi Kebutuhan.....	64
c.	Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.....	64
4.	Rencana Intervensi.....	64
a.	Latar Belakang.....	64
b.	Tujuan Umum dan Khusus.....	65
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	65
d.	Sistem Partisipan .....	66
e.	Metode dan Teknik.....	67
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan .....	68
g.	Analisis Kelayakan Program .....	69
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah.....	70
<b>D.</b>	<b>Analisis Penataan Lingkungan.....</b>	<b>71</b>
1.	Gambaran Masalah .....	71
2.	Tinjauan Konsep.....	72
3.	Assesmen.....	74
a.	Identifikasi Masalah .....	74
b.	Identifikasi Kebutuhan.....	76

c.	Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial .....	77
4.	Rencana Intervensi.....	78
a.	Latar Belakang.....	78
b.	Tujuan Umum dan Khusus.....	79
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	79
d.	Sistem Partisipan .....	79
e.	Metode dan Teknik.....	80
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan .....	81
g.	Analisis Kelayakan Program .....	81
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah.....	83
E.	Analisis Penanggulangan Bencana.....	84
1.	Gambaran Masalah .....	84
2.	Tinjauan Konsep.....	86
a.	Kajian tentang bencana.....	86
b.	Kajian tentang Pohon Tumbang .....	87
c.	Kajian tentang penanggulangan bencana.....	87
3.	Assesmen.....	88
b.	Identifikasi Masalah .....	88
c.	Identifikasi Kebutuhan.....	91
e.	Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.....	92
4.	Rencana Intervensi.....	92
a.	Latar Belakang.....	92
b.	Tujuan Umum dan Khusus.....	93
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	93
d.	Sistem Partisipan .....	94
e.	Metode dan Teknik.....	94
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan .....	95
g.	Analisis Kelayakan Program .....	96
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah.....	97
III	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	98
A.	Kesimpulan .....	98
B.	Rekomendasi .....	99

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Praktikum.....	6
Tabel 2.1 Mata Pencaharian masyarakat kelurahan sukapura.....	28
Table 2.2 Bentuk Kegiatan Program Penyuluhan Forum PBI Sukapura.....	39
Table 2.3 Sistem Partisipan Program Sosiliasiasi BPJS Kesehatan PBI.....	40

Table 2.4 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Sosialisasi Program BPJS Kesehatan PBI.....	41
Table 2.5 Analisis SWOT Kegiatan Sosialisasi Program BPJS Kesehatan PBI....	42
Table 2.6 Jadwal dan Langkah – langkah Kegiatan Sosialisasi Program BPJS Kesehatan PBI.....	43
Table 2.7 Rencana Anggaran Pengeluaran Wajib Dana Swadaya Masyarakat di RW 06 Kelurahan Sukapura.....	44
Table 2.8 Bentuk Kegiatan Program Forum Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura.....	51
Table 2.9 Sistem Partisipan Program Forum Diskusi Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura.....	52
Table 2.10 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Forum Penguatan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura.....	54
Table 2.11 Analisis SWOT Forum Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura.....	55
Table 2.12 Jadwal dan Langkah -langkah Forum Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura.....	56
Table 2.13 Sistem Partisipan Program Penyuluhan SUPEJA.....	67
Table 2.14 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyuluhan Mejahit di Kelurahan Sukapura.....	69
Table 2.15 Analisis SWOT Kegiatan Penyuluhan SUPEJA.....	70
Table 2.17 Jadwal dan Langkah – langkah Kegiatan Penyuluhan SUPEJA.....	71
Table 2.18 Sistem Partisipan Kegiatan SULISA.....	80
Table 2.19 Rencana Anggaran Kegiatan SULISA.....	81
Table 2.20 Analisis SWOT Kegiatan Program SULISA.....	82
Table 2.21 Jadwal dan Langkah – langkah Kegiatan SULISA.....	83
Table 2.22 Sistem Partisipan Kegiatan Sukapura Siapsiaga Bencana.....	94
Table 2.23 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyuluhan Sukapura Siapsiaga Bencana.....	95
Table 2.24 Analisis SWOT Program Sukapura Siapsiaga Bencana.....	96
Table 2.25 Jadwal dan Langkah – langkah Kegiatan Sukapura Siapsiaga Bencana.....	97

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Dokumentasi Pembagian Grup Praktikum Laboratorium Angakatan 2022.....	7
Gambar 1.2 Dokumentasi pembagian Kelompok dan dosen pembimbing.....	8
Gambar 1.3 Dokumentasi pembekalan pra lapangan.....	9

Gambar 1.4 Dokumentasi Bimbingan Pra Lapangan.....	9
Gambar 1.5 Dokumentasi Survey Lokasi Praktikum di Kelurahan Sukapura.....	10
Gambar 1.6 Dokumentasi Pelepasan Praktikum Laboratoriu.....	11
Gambar 1.7 Dokumentasi Pembekalan Praktikum jaminan sosial.....	11
Gambar 1.8 Dokumentasi Pelepasan Praktikum di kelurahan sukapura.....	12
Gambar 1.9 Dokumentasi insiasi sosial di posyandu di RW 05 Kelurahan Sukapura.....	13
Gambar 1.10 Dokumentasi Lingkungan di RW 05 Kelurahan Sukapura.....	13
Gambar 1.11 Dokumentasi Lingkungan di RW 06 Kelurahan Sukapura.....	14
Gambar 1.12 Dokumentasi Kegiatan di RW 07 Kelurahan Sukapura.....	14
Gambar 1.13 Dokumentasi Lingkungan RW 10 Kelurahan Sukapura.....	14
Gambar 1.14 Dokumentasi Home Visit di Rumah Ketua RW 06 Kelurahan Sukapura.....	15
Gambar 1.15 Dokumentasi Kegiatan Akta Kelahiran Di Kelurahan Sukapura....	15
Gambar 1.16 Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	16
Gambar 1.17 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS).....	17
Gambar 1.18 Dokumentasi Home Visit Analis Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS) di RW 06 Kelurahan Sukapura.....	17
Gambar 1.19 Dokumentasi Pembekalan Analis Pemeberdayaan Sosial.....	18
Gambar 1.20 Dokumentasi Observasi Home Industri Kaos Kaki di RW 07 Kelurahan Sukapura.....	19
Gambar 1.21 Dokumentasi Observasi Lingkungan Pembuatan Jilbab di RW 07 Kelurahan Sukapura.....	19
Gambar 1.22 Dokumentasi Wawancara Staff CV. Tulips Baby di RW 13 Kelurahan Sukapura.....	20
Gambar 1.23 Dokumentasi Pembekalan Analis Pemberdayaan Sosial.....	20
Gambar 1.24 Dokumentasi Kegiatan MPA Terkait Analis Penataan Lingkungan Sosial di RW 10 Kelurahan Sukapura.....	21
Gambar 1.25 Observasi Lingkungan di RW 10 Kelurahan Sukapura.....	21
Gambar 1.26 Dokumentasi Tumpukan sampah di RW 10 Kelurahan Sukapura..	22
Gambar 1.27 Dokumentasi Kondisi selokan di RW 10 Kelurahan Sukapura.....	22
Gambar 1.28 Dokumentasi Truk Pengangkut Sampah di RW 10 Kelurahan Sukapura.....	22
Gambar 1.29 Wawancara dengan ibu - ibu kader RW 10 Kelurahan Sukapura...	23
Gambar 1.30 Dokumentasi Pembekalan Analis Penanggulangan Bencana.....	23
Gambar 1.31 Dokumentasi proses MPA pada profil Penanggulangan bencana....	24
Gambar 1.32 Dokumentasi Wawancara Ketua RW 10 Kelurahan Sukapura terkait bencana alam yang pernah terjadi.....	24

Gambar 1.33 Dokumentasi Kegiatan Lokakarya Di Kelurahan Sukapura.....	25
Gambar 1.34 Dokumentasi Praktikan beserta Kelompok 6 mendiskusikan dengan pihak Kelurahan dan membahas serta tanya jawab 5 isu profil dari hasil assemen.....	25
Gambar 1.35 Plakat yang di berikan ke kelurahan Sukapura.....	26
Gambar 1.36 Dokumentasi penyerahan plakat dari dosen pembimbing kepada Pihak kelurahan sukapura.....	26
Gambar 2.1 Pohon Masalah Isu Jaminan Sosial.....	36
Gambar 2.2 Pohon Masalah Isu Sumber Dana Bantuan Sosial.....	48
Gambar 2.3 Proses Pembuatan Jilbab.....	57
Gambar 2.4 Dokumentasi Wawancara Pemilki Home industry Jilbab Ibu Martha.....	61
Gambar 2.5 Pohon Masalah Isu Pemberdayaan Sosial.....	63
Gambar 2.6 Kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) Berlangsung.....	72
Gambar 2.7 Selesaiannya Kegiatan Gerakan Pemugutan Sampah (GPS).....	73
Gambar 2.8 Pohon masalah Isu Panataan Lingkungan.....	76
Gambar 2.9 Situasi Terjadinya Bencana Alam Pohon Tumbang Terjadi.....	84
Gambar 2.10 Dokumentasi Pihak Polisi Mengamandakan Lokasi Bencana Alam Terjadi.....	85
Gambar 2.11 Proses Kegiatan Evakuasi Bencana Alam Pohon Tumbang.....	85
Gambar 2.12 Pohon Masalah Isu Penanggulangan Bencana.....	90

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program studi perlindungan dan pemberdayaan merupakan program studi yang berdiri pada tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 436/KPT/I/2018, sebagai salah satu syarat untuk pengajuan perubahan kelembagaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung pada Juli 2019. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan/atau kompetensi dalam bidang profesional dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Proses Pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan – keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan dihasilkan untuk memiliki keunggulan meliputi aspek kemampuan kerja, kemampuan manajerial, penguasaan pengetahuan dan tanggung jawab, yaitu:

#### **1. Analisis Jaminan Sosial**

Yaitu Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan yang membahas mengenai pengetahuan konsep teoritis kebutuhan dasar manusia, konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial, konsep perlindungan dan jaminan sosial, konsep standar praktik pekerjaan sosial dan keterampilan mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, mampu menganalisis dan menyusun menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar. Serta mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji implementasi, mendesain program, mengaplikasikan sistem dan menyelesaikan masalah dalam sistem jaminan sosial dalam perlindungan sosial.

#### **2. Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial**

Yaitu Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan yang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam menjelaskan dan menerapkan pengelolaan sumber dana bantuan sosial dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial. Mahasiswa belajar konsep bantuan sosial dan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan penggalangan dana, konsep Sembilan prinsip utama (the cardinal principles) dan konsep “the capital program” dalam penggalangan dana untuk praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial. Selanjutnya, mahasiswa belajar konsep dana hibah dan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam penggalangan dana serta kebijakan yang mengaturnya. Mahasiswa belajar untuk meningkatkan keterampilannya dalam menyusun penyalurannya untuk praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial. Mahasiswa juga belajar untuk memahami dan meningkatkan keterampilannya merancang sistem informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

### 3. Analisis Pemberdayaan

Yaitu Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan yang membahas mengenai pemberdayaan baik itu untuk individu, keluarga, kelompok, dan komunitas serta organisasi. Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau kelompok dalam mengambil keputusan dan bertindak untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan pada individu atau kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam memperbaiki kondisi hidupnya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan mendesain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam pemberdayaan sosial.

### 4. Analisis Penataan Lingkungan

Yaitu Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan yang membahas mengenai (Ekologi) ilmu tentang bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisme lain dalam lingkungan hidup (biotik) dan dengan lingkungan tak hidup (abiotik) tanah, air, bentuk materi lain, dan energi yang sebagian besar dari matahari (Millier & Spoolman, 2009), dan Green Social Work (GSW) praktik pekerja sosial yang berfokus pada saling ketergantungan antara orang, organisasi sosial dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungan (flora/tumbuhan dan fauna/lingkungan fisik, dan perilaku interpersonal yang merusak kesejahteraan makhluk hidup (Lena Dominelli, 2012). Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendesain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam penataan lingkungan sosial.

## 5. Analisis Pelaksanaan Bencana

Yaitu Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai – nilai serta prinsip penanggulangan bencana alam, nonalam, dan sosial, sejak masa siaga darurat bencana, darurat bencana dan pasca bencana melalui program – program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Profil ini membahas pengetahuan tentang konsep dan paradigma bencana dan korban bencana, sphere project, prinsip – prinsip panduan bagi pengungsi, program – program perlindungan sosial dan pemberdayaan terhadap korban bencana baik saat terjadinya bencana maupun pasca bencana. Diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendesain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan Praktikum Laboratorium ini dilaksanakan oleh praktikan di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung selama kurang dari 3 bulan. Selama kegiatan praktikum ini, praktikan melakukan praktik analisis kelima profil lulusan prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana dengan setiap profil dilakukan selama 2 minggu. Melalui kegiatan praktikum, praktikan ditugaskan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap masalah yang berkaitan dengan isu masalah yang berkaitan dengan sesuai profil analisis. Kegiatan praktikum ini juga didukung dengan kegiatan supervise oleh Dosen Pembimbing sebagai metode pengalihan pengetahuan dan keterampilan Pekerjaan Sosial dalam suatu praktik. Supervisi terdapat mahasiswa meliputi supervise Pendidikan, administrative, dan suportif, agar praktikum berjalan sesuai yang diharapkan.

### **B. Tujuan dan Manfaat Praktikum**

Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut.

#### 1. Tujuan Praktikum

Praktikum Laboratorium bertujuan agar praktikan memiliki :

- a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.

- c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
  - 1) Pendekatan Awal
  - 2) Asessment
  - 3) Perencanaan Intervensi

## 2. Manfaat Praktikum

Manfaat praktikum laboratoriu program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial terbagi 2 (dua). Manfaat bagi mahasiswa adalah:

- a. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- c. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial

Kemudian, manfaat praktikum laboratorium bagi Lembaga adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- b. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

### C. Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum dilakukan di Kelursahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung . Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
  - a. Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
  - b. Pelepasan Praktikan : 8 Februari 2023
2. Lapangan : 16 April – 15 April 2023
3. Pasca Lapangan : 16 April – 10 Mei 2023
  - a. Bimbingan Laporan : 16 April – 26 April 2023
  - b. Pendaftaran Ujian : 27 – 29 April 2023
  - c. Ujian Lisan Praktikum : 1 – 2 Mei 2023
  - d. Perbaikan dan Penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

Kegiatan praktikum dilaksanakan mulai dari 8 Februari sampai dengan 15 April 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut

*Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Praktikum*

No	Rincian Kegiatan	Februari				Maret				April	
		Pekan				Pekan				Pekan	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pemberkalan Materi Analisis Jaminan Sosial										
2	Praktik Analisis Jaminan Sosial										
3	Supervisi										
4	Penyusunan Laporan Analisis Jaminan Sosial										
5	Pembekalan Materi Sumber Dana Bantuan Sosial										
6	Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial										
7	Penyusunan Laporan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial										
8	Pembekalan Materi Pemberdayaan Sosial										
9	Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial										
10	Penyusunan Laporan Analisis Pemberdayaan Sosial										
11	Pembekalan Materi Penataan Lingkungan Sosial										



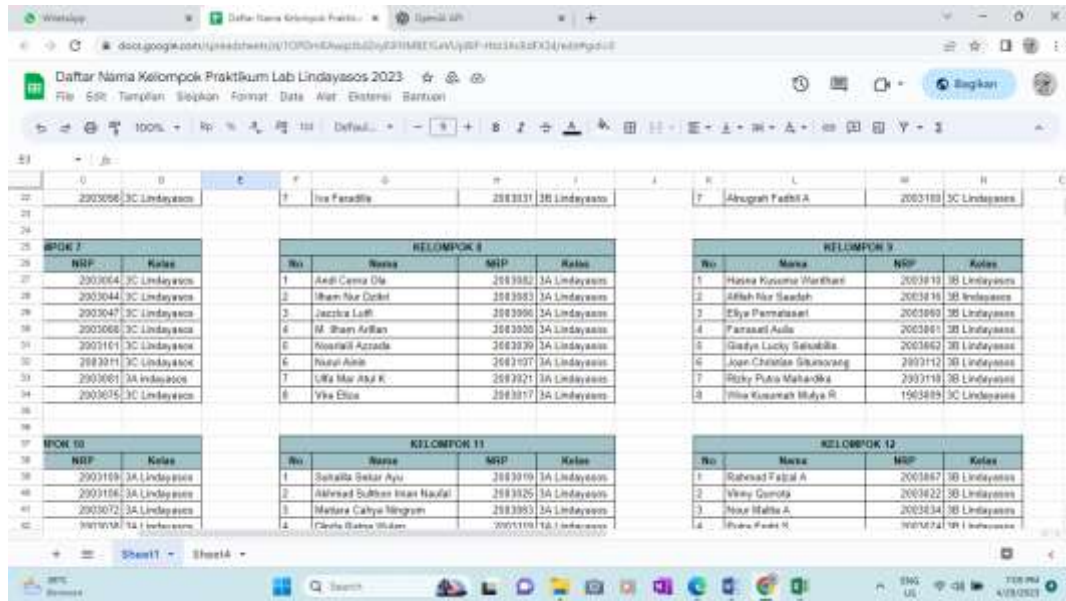


Figure 1.1 Dokumentasi Pembagian Grup Praktikum Laboratorium Angkatan 2020

Setelah itu, kelompok praktikum yang sudah dikirimkan sesuai dengan ketentuan pengumuman persiapan praktikum laboratorium. Pada tanggal 21 Januari 2023 telah diinfokan pembagian dosen pembimbing yang setiap kelompok mendapatkan 1-2 dosen pembimbing. Adapun praktikan ditemaotkan di kelompok 6 dengan jumlah anggota sebanyak 8 orang anggota dengan dosen pembimbing ibu decky dengan lokasi peraktikum berada di kelurahan sukapura, kecamatan kiaracondong, kota bandung.

43	8	2003075	St. Ainun Jariah		
44	VI	1	2003082	Andi Cenra Ola	DR. Decky Irianti. MP
45		2	2003083	Ilham Nur Dzikri	
46		3	2003066	Jazica Lutfi	
47		4	2003008	M. Ilham Arifian	
48		5	2003039	Noorlaili Azzada	
49		6	2003107	Nurul Amin	
50		7	2003021	Ulfa Maratul K	
51		8	2003017	Vira Eliza	
					Kel. Sukapura

Figure 1.2 Dokumentasi pembagian kelompok dan dosen pembimbing

Setelah ditentukan kelompok, dosen pembimbing, dan lokasi praktikum, maka selanjutnya pada hari rabu, 25 januari 2023, diadakan pembekalan laboratorium secara offline pada pukul 08:30 – 11:30 WIB di tempat Auditorium Poltekesos Bandung. Kegiatan ini bertujuan sebagai pembekalan mahasiswa

sebelum melakukan praktik laboratorium. Dalam pembekalan ini dijelaskan bahwa praktikum laboratorium menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan prodi lindsayasos yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penata Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Lalu dijelaskan juga bahwa praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial, kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, dan memiliki kemampuan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam tahap pendekatan awal, assessment, dan perencanaan intervensi. Kegiatan ini memiliki manfaat meningkatkan kompetensi bagi mahasiswa dan meningkatnya kualitas kurikulum bagi Lembaga.



*Figure 1.3 Dokumentasi pembekalan pra lapangan praktik laboratotium angkatan 2020*

Selanjutnya praktikan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yaitu ibu decky dan survey lokasi tempat praktikum laboratorium kelompok 6 yaitu di kelurahan sukapura, kecamatan kiaracondong, kota bandung pada hari kamis tanggal 26 januari 2023. Ibu decky selaku dosen pembimbing menjelaskan hal apa saja yang diperlukan sebelum melakukan assessment di kelurahan sukapura.



Figure 1.4 Dokumentasi Bimbingan Pra Lapangan



Figure 1.5 Dokumentasi Survey Lokasi Praktikum Di Kelurahan Sukapura

b. Pembekalan Profil Analisis Jaminan Sosial dan Pelepasan Praktikan (08 Februari 2023)

Pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023, praktikan mengikuti pembekalan terkait dengan materi Analisis Jaminan Sosial oleh narasumber Ibu Gayatri Waditra Nirwesti, ME selaku perencana ahli muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan

Sosial, Bappenas di Gedung pascasarjana lantai 2 poltekesos bandung sekaligus pelepasan praktikan ke lapangan oleh kaprodi yaitu ibu lina favoirita sutiaputri Ph.D. dalam kegiatan pembekalan analis jaminan sosial tersebut, praktikan mendapatkan materi mengenai profil satu yaitu Analis Jaminan Sosial yang akan mempermudah praktikan dalam melakukan praktik laboratorium terkait Analis Jaminan Sosial di kelurahan sukapura. Adapun isi materi yang diberikan oleh ibu Gayatri Waditra Nirwesti,ME adalah Kebijakan dan struktur jaminan sosial, tantangan program jaminan sosial kepada pekerja informal di Indonesia, potensi kontribusi lulusan jaminan sosial, kebijakan dan struktur jaminan sosial.



Figure 1.6 Dokumentasi Pelepasan Praktikum Laboratorium



Figure Gambar 1.7 Dokumentasi Pembekalan Jaminan Sosial

## 2. Kegiatan Lapangan

Kegiatan lapangan dilaksanakan pada tanggal 08 februari 2023 sampai dengan 15 april 2023 di kelurahan sukapura, kecamatan kiaracandong, kota bandung, provinsi jawa barat. Praktikan melakukan inisiasi sosial, assessment dan

penyusunan rencana intervensi dengan menggunakan beberapa teknik yang pernah diajarkan sebelumnya. Kegiatan lapangan meliputi praktik analis jaminan sosial, praktik sumber dana bantuan sosial, praktik analis penataan lingkungan sosial, serta praktik analis penanggulangan bencana.

a. Praktik Analis Jaminan Sosial

Kegiatan praktik analis jaminan sosial dilaksanakan 08 sampai 22 Februari 2023, Pada hari rabu tanggal 08 februari 2023, praktikan melaksanakan inisiasi sosial dengan mengunjungi kantor kelurahan sukapura. Inisiasi sosial merupakan tahap awal dalam intervensi komunitas untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, stakeholder, dan lain – lain. Disana, praktikan meminta izin sekaligus memberikan surat perizinan yang dibaut oleh Prodi perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Hasil dari kegiatan ini yaitu praktikan memperoleh dukungan dari pihak kelurahan serta kelurahan berkomitmen untuk mendukung penuh kegiatan praktikum yang praktikan jalani.



*Gambar 1.8 Dokumentasi Pelepasan Praktikum Di Kelurahan Sukapura*

Pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023, praktikan melakukan inisiasi sosial dengan mengikuti kegiatan masyarakat yang berdekatan dengan kantor kelurahan sukapura. Praktikan mengikuti kegiatan posyandu di RW 05 kelurahan sukapura dan assessment Bersama kader posyandu dan PKK.



*Gambar 1.9 Dokumentasi Inisiasi Sosial Di Posyandu di RW 05 Kelurahan Sukapura*

walk disekitar kelurahan sukapura agar lebih mengenal bagaimana medan desa, sumber daya. Untuk mempermudah kelompok 6 dengan jumlah 8 orang anggota dalam melakukan transeck walk di kelurahan sukapura secara keseluruhan, maka dilakukan pembagian Rukun Warga (RW) dimana setiap 2 orang melakukan transeck walk di 4 Rukun Warga (RW) di kelurahan sukapura. Terdapat 15 Rukun Warga (RW) di kelurahan sukapura, kecamatan kiaracondong, kota bandung, saya ainin dengan teman rekan saya ilham kebagian melakukan assesment di kelurahan RW 05, 06, 07, dan 12.



*Gambar 1.10 Dokumentasi Lingkungan di RW 05 Kelurahan Sukapura*



*Gambar 1.11 Dokumentasi Lingkungan di RW 06 Kelurahan Sukapura*



*Gambar 1.12 Dokumentasi Kegiatan di RW 07 Kelurahan Sukapura*



*Gambar 1.13 Dokumentasi Lingkungan di RW 10 Kelurahan Sukapura*

Pada hari sabtu tanggal 11 februari 2023, praktikan melakukan home visit kepada ketua RW 06 mengenai isu terkait Analis Jaminan Sosial. Dari hasil teknik home visit kepada ketua RW 06 telah didapatkan isu/masalah “Kurang nya partisipan pekerja sektor informal (Eks pekerja sektor formal swasta) terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan”.



*Gambar 1.14 Dokumentasi Home Visit ke rumah Ketua RW 06 Kelurahan Sukapura*

Pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023, praktikan mengikuti kegiatan di kelurahan sukapura yaitu kegiatan pembuatan akta gratis bagi masyarakat. Dari hasil wawancara praktikan dengan staff pengurus akta kelahiran terdapat banyak warga yang sudah lansia tetapi belum memiliki akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya mengurus segala kebutuhan identitas tentang diri mereka.



*Gambar 1.15 Dokumentasi Kegiatan Akta Kelahiran di kelurahan sukapura*

## b. Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Kegiatan praktik analisis sumber dana bantuan sosial dilaksanakan pada tanggal 22 Februari sampai dengan 08 Maret 2023. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, praktikan mengikuti kegiatan pembekalan praktikum laboratorium profil sumber dana bantuan dana sosial dengan narasumber Pan Tonton Heriyanto yang merupakan CSR Manager di PT. AAPC Indonesia.

Dari kegiatan pembekalan tersebut, praktikan mendapatkan pengetahuan terkait dengan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial yang nantinya dapat membantu praktikan dalam melakukan assessment terkait isu sumber dana bantuan sosial. Adapun materi yang praktikan ambil dari pembekalan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial yaitu masalah dalam pengelolaan dana bantuan sosial dengan mitra, manajemen sumber dana bantuan sosial, komponen dalam membangun jaringan, serta budgeting.



*Gambar 1.16 Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS)*



*Gambar 1.17 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS)*

Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, praktikan melakukan wawancara kepada ketua RW 06 untuk mencari isu permasalahan terkait Analis Sumber Dana Bantuan Sosial. Hasil dari wawancara dengan ketua RW 06, praktikan mendapatkan informasi terkait dana swadaya masyarakat RW 06 di kelurahan sukapura.



*1.18 Dokumentasi Home Visit Terkait Analis Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS) di RW 06 Kelurahan Sukapura*

### c. Praktik Analis Pemberdayaan Sosial

Kegiatan praktik analis pemberdayaan sosial dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 22 Maret 2023. Pada hari rabu tanggal 08 maret 2023, praktikan mengikuti pembekalan praktikum laboratorium profil pemberdayan sosial di Gedung auditorium poltekesos bandung dengan narasumber yaitu Pak Samsul Maarif selaku Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kabupaten Ciajur.

Dari kegiatan tersebut, praktikan mendapatkan pengetahuan terkait dengan profil pemberdayaan sosial yang nantinya dapat membantu praktikan dalam mengasessment permasalahan terkait Analis pemberdayaan sosial. Adapun materi yang praktikan dapat dari materi yang disampaikan oleh Pak Samsul dalam pemberdayaan yaitu pemberdayaan social sebagai upaya untuk mencapai expected condition, pendekatan pemberdayaan masyarakat, actor – actor dalam program pemberdayaan, tahapan pemberdayaan, bentuk pemberdayaan, penyelenggaraan pemberayaan, monitoring dan evaluasi.



*Gambar1.19 Dokumentasi Pembekalan Analis Pemberdayaan Sosial*

Pada tanggal 08 maret 2023, praktikan melakukan observasi lapangan di home industry yang berlokasi di RW 07 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung. Praktikan melakukan home visit kepada rumah yang melakukan pengepakan kaos kaki dan dari hasil wawancara ternyata kaos kaki tersebut tidak diproduksi di rumah tersebut dan hanya melakukan pengepakan di rumah tersebut.



*Gambar 1.20 Dokumentasi Observasi Home industry kaos kaki di RW 07 Kelurahan Sukapura*

Selanjutnya praktikan melakukan observasi dan survey ke home industry jenis jilbab di RW 07 pada tanggal 09 maret 2023, praktikan sebelum melakukan wawancara dengan pemilik home industry jilbab tersebut melakukan observasi di lingkungan tempat beroperasinya jilbab yang diprouksi. praktikan melakukan wawancara kepada pemilik home industry jilbab agar dapat mengetahui permasalahan terkait Analisis Pemberdayaan Sosial, dari hasil wawancara praktikan mendapatkan isu bahwa pemilik home industry tidak mengambil karyawan dari kelurahan sukapura dikarenakan sumber daya manusia (SDM) kurang memiliki keahlian sesuai home industry yang ia jalankan.



*Gambar 1.21 Dokumentasi Observasi Lingkungan Pembuatan jilbab RW 07 Kelurahan Sukapura*

Pada tanggal 10 maret 2023, praktikan kembali melakukan observasi home industry di kelurahan sukapura untuk mengetahui lebih dalam permasalahan utama mengenai isu Analis Pemberdayaan Sosial. Prkatikan mengunjungi CV. Tulips Baby yang memproduksi pakaian dan berbagai perlengkapan bayi. Praktikan melakukan wawancara untuk mengetahui untuk mengetahui apakah terdapat permasahan mengenai Analis Pemberdayaan Sosial.



*Gambar 1.22 Dokumentasi Wawancara Staff CV. Tulips Baby di RW 13 Kelurahan Sukapura*

#### d. Praktik Analis Penataan Lingkungan

Kegiatan praktik analis penataan lingkungan sosial dilaksanakan pada tanggal 22 Maret sampai dengan 5 April 2023. Pada Jumat pada tanggal 24 Maret 2023, praktikan mengikuti pembekalan praktikum labaratorium profil analis penataan lingkungan sosial. Adapapun narasumber yaitu pak Ade Reno, A. KS, MSW dari Country Director Lutheran World Refief.

Dari kegiatan tersebut, praktikan mendapatkan pengetahuan terkait dengan analis pentaan lingkungan sosial yang nantinya akan digunakan dalam praktikum profil keempat. Adapun materi yang praktikan dapat dari pembekalan analis penataan lingkungan yakni gambaran umum penataan lingkungan sosial yang dikaitkan dengan green social work, komptensi yang dibutuhkan untuk praktek pentaan lingkungan sosial, peluang kerja pada bidang penataan sosial.



#### *1.23 Dokuementasi Pembekalan Analis Pemberdayaan Sosial*



*Gambar 1.24 Dokumentasi kegiatan MPA terkait Analisis Penataan Lingkungan Sosial di RW 10 Kelurahan Sukapura*

Pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023, praktikan melakukan observasi lapangan di kelurahan sukapura tepatnya di RW 10 untuk mengamati lingkungan sekitar. Dengan kegiatan ini, praktikan melihat secara langsung bagaimana keadaan lingkungan di kelurahan sukapura khususnya di RW 10.



*Gambar 1.25 Observasi Lingkungan di RW 10 Kelurahan Sukapura*



*Gambar 1.26 Tumpukah sampah di RW 10 Kelurahan Sukapura*



*Gambar 1.27 Kondisi Selokan Di RW 10 Kelurahan sukapura*



*Gambar 1.28 Dokumentasi Truk Pengangkut Sampah di RW 10 Kelurahan Sukapura*

Pada hari rabu tanggal 30 Maret 2023, praktikan juga melakukan wawancara dengan ibu – ibu kader RW 10 kelurahan sukapura terkait permasalahan yang telah didapatkan dari hasil kegiatan Methodlogy Participatory Assesment (MPA). Praktikan menanyakan isu terkait kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) kepada ibu – ibu kader RW 10 Kelurahan Sukapura.



*Gambar 1.29 Wawancara dengan ibu – ibu kader RW 10 Kelurahan Sukapura*

Kegiatan praktikan analisis penanggulangan bencana dilaksanakan pada tanggal 05 April sampai dengan 15 April 2023. Pada hari rabu tanggal 05 April 2023, praktikan mengikuti pembekalan praktikum laboratorium profil analisis penanggulangan bencana. Adapun narasumbernya yaitu Pak Mohd Robi Amri dari Perencanaan Ahli Madya BNPB Jakarta.

Dari pembekalan ini, praktikan dapat mengetahui terkait dengan potensi kebencanaan yang ada di Indonesia beserta penganggulangnya. Bencana merupakan urusan Bersama, perlu dikembangkan kemitraan, sinergitas, dan inklusifitas untuk penganggulungan yang efektif. Lalu dijelaskan juga bahwa kesejahteraan sosial merupakan salah satu disiplin ilmu strategis dan dibutuhkan dalam berbagai aspek penganggulungan bencana



*Gambar 1.30 Dokumentasi Pemebejalan analisis penanggulungan bencana*

Untuk memperoleh informasi mengenai potensi bencana di kelurahan sukapura beserta dengan penganggulangnya, maka pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, praktikan dengan kelompok 6 melakukan kegiatan Methodlogy Participatory Assesment (MPA) untuk mempermudah praktikan dalam mencari isu terkait analis penanggulangan bencana.



*Gambar 1.31 Dokumentasi Proses MPA pada profil penganggulan bencana*

Pada hari kamis tanggal 06 April 2023, praktikan melakukan assesment kembali dengan menggunakan teknologi home visit kerumah ketua RW 10 kelurahan sukapura untuk mencari lebih banyak informasi terkait bencana alam yang pernah terjadi di kelurahan sukapura.



*Gambar 1.32 Dokumentasi Wawancara ketua Rw 10 Kelurhan Sukapura terkait bencana alam yang pernah terjadi*

Pada tanggal 12 April 2023, praktikan beserta anggota kelompok lainnya mengadakan kegiatan Lokakarya. Kegiatan lokakarya dilaksanakan dengan ibu – ibu PKK dan staff Kelurahan Sukapura di Aula kelurahan sukapura pada pukul 09.00 WIB. Agenda kegiatan ini yaitu penyampaian temuan masalah dari 5 profil hasil assesmen yang dilakukan untuk validitas serta penyadaran masalah dan tanya jawab.

Dari kegiatan ini, praktikan mendapatkan informasi dari masyarakat kelurahan sukapura terkait dengan isu masalah yang praktikan temui di profil – profil sebelumnya ketika praktikan melakukan assesmen agar pihak kelurahan sukapura mengetahui dan menyadari urgentsitas permasalahan tersebut.

Dengan isu – isu yang praktikan beserta kelompok 6 jelaskan pihak kelurahan sukapura, kelurahan sukapura setuju dan mengkonfirmasi bahwa kelima masalah terkait dengan profil analis jaminan sosial, sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial, penataan lingkungan sosial, dan penganggulangan bencana yang praktikan beserta kelompok 6 jelaskan memang benar adanya.



*Gambar 1.33 Dokumentasi Kegiatan Lokakarya di kelurahan sukapura*



*Gambar 1.34 Dokumentasi Praktika beserta anggota kelompok 6 mendiskusikan dengan pihak kelurahan dan membahas serta tanya jawab 5 isu profil dari hasil assesmen*

Seiring dengan berakhirnya kegiatan praktikum laboratorium, maka pada tanggal 1 April 2023 dari kegiatan lokakarya tersebut praktikan mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama praktikum serta memberikan plakat kepada pihak kelurahan sebagai cinderamata dan kenang – kenangan atas pemberian izin dan segala dukungan yang diberikan oleh pihak kelurahan sukapura kepada praktikan.



*Gambar 1.35 Plakat yang diberikan ke kelurahan sukapura*



*Gambar 1.36 Dokumentasi penyerahan plakat dari dosen pembimbing kepada pihak kelurahan sukapura*

Setelah rangkaian kegiatan sudah dilakukan, maka selanjutnya hasil assessment dikaji oleh praktikan untuk menyusun rencana intervensi.

### 3. Kegiatan Pasca Lapangan

Kegiatan pasca lapangan dilakukan setelah kegiatan praktikum di lapangan selesai yaitu tanggal 16 April sampai dengan 28 April 2022. Pada tanggal 29 April 2023, praktikan melakukan pendaftaran ujian lisan.

#### c. Sistematis Laporan

Output dari kegiatan praktikum ini adalah berupa laporan akhir praktikum. Laporan praktikum dibuat dan diperiksa pada setiap tahap perkembangan praktikum yang mengacu pada kolom hasil-hasil yang diharapkan pada bagian tugas praktikan.

Berikut ini adalah sistematika laporan akhir individu Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 dimana sistematika laporan ini akan digunakan oleh praktikan dalam menyusun hasil laporan praktikum.

#### **BAB I PENDAHULUAN :**

Memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan.

#### **BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM :**

Berisi tentang Profil Analisis Jaminan Sosial, Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analisis Pemberdayaan Sosial, Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analisis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, hasil asesmen, dan rencana intervensi.

#### **BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI :**

Memuat kesimpulan hasil praktikum dan rekomendasi yang ditunjukkan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

## II. PRAKTIKUM LABORATORIUM

### A. Analis Jaminan Sosial

#### 1. Gambaran Masalah

Pada dasarnya program jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakatnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pada tahun 2004 mengeluarkan UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengatur pelaksanaan program jaminan sosial di Indonesia. Badan penyelenggara jaminan sosial atau selanjutnya disingkat sebagai BPJS juga lahir sebagai otoriter resmi yang menjalankan dua jenis bentuk jaminan sosial, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan .

Berdasarkan data yang praktikan peroleh dari Profil Kelurahan Sukapura tahun 2021 berdasarkan mata pencaharian pokok :

*Tabel. 2.1 Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Sukapura*

NO	PEKERJAAN	JUMLAH		
		L	P	JUMLAH
1	Tani	1.590	2.579	4.169
2	Dagang	2.591	1.370	3.961
3	Pelajar	1.816	2.139	3.955
4	Mahasiswa	1.286	1.986	3.314
5	Pegawai Swasta	1.655	1.276	2.931
6	Pensunan	1.286	1.044	2.330
7	Pegawai Negeri Sipil	795	116	911
8	TNI – Polri	469	311	780
<b>JUMLAH</b>		<b>11.488</b>	<b>10.821</b>	<b>22.351</b>

Rukun Warga (RW) 06, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung merupakan salah – satu Rukun Warga yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor formal swasta namun banyak yang di PHK sehingga mereka terpaksa bekerja di sektor informal. Pekerja informal (Eks pekerja formal swasta) dari mereka tidak mengaktifkan kembali dan tidak melakukan perubahan status kepersertaan BPJS Kesehatan mereka dikarenakan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang keaktifan kepersertaan kartu BPJS Kesehatan.

Masyarakat di RW 06 yang sekarang sebagai pekerja informal (Eks Formal Swasta) kebanyakan bekerja sebagai petani & pedagang mereka merasa tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan yang dulunya dibayarkan oleh pihak perusahaan tempat mereka bekerja. Padahal jika mereka mendaftarkan diri mereka sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) maka kartu BPJS Kesehatan mereka akan aktif kembali, minimnya pengetahuan dan kesadaran tentang perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan membuat mereka pekerja informal (Eks formal

swasta) tidak mendapatkan jaminan sosial serta berkurangnya partisipasi masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.

Jika hal ini terus terjadi, keterpaparan pekerja sektor informal (Eks pekerja formal swasta) terhadap resiko – resiko tertentu akan meningkat dan bukan hanya merugikan pekerja itu saja, tetapi mempernagruhi kesejahteraan keluarganya dan kualitas kehidupannya. Maka dari itu praktikan tertarik untuk mengkaji tentang jaminan kesehatan di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung dengan harapan para pekerja sektor informal (Eks pekerja formal swasta) mendapatkan hak mereka untuk jamiana sosial .

Kelurahan sukapura merupakan salah - satu kelurahan di kecamatan kiaracandong, kota bandung yang sebagian besar kepala keluarganya yang awalnya bekerja di sektor formal swasta yang kemudian di PHK, lalu menjadi pekerja informal yaitu pedangan dan petani. Namun masyarakat yang dulunya bekerja formal di swasta lalu berpidah menjadi pekerja informal tidak mengetahui bagaimana cara merubah status kepesertaan BPJS Kesehatan.

## **2. Tinjaun Konsep**

### **a. Jaminan Sosial**

Pengertian Jaminan Sosial menurut *International Labour Organization (ILO)* adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak diadakan sistem Jaminan Sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan sebagai akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja, sementara tidak bekerja, hari tua dan kematian dini, perawatan medis, termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan<sup>15</sup>. Pengertian Jaminan Sosial tersebut masih bersifat universal sehingga dalam implementasinya harus disesuaikan dengan berbagai pendekatan yang berlaku di setiap negara.

Bank Dunia dalam Situmorang (2013) menggaris bawahi pengertian jaminan sosial sebagai proteksi sosial. Selanjutnya, proteksi sosial ini terdiri dari berbagai komponen yang menjadi satukesatuan yang disebut sistem jaminan sosial, yaitu: 1) Labor market and employment; 2) Social insurance; 3) social assistance; 4) Family Allowance or child protection; 5) safe guard policy.

Jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi setiap peserta program dan anggota keluarganya, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Pelaksanaan SJSN merupakan kewajiban negara, sekaligus kewajiban penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan mekanisme asuransi sosial dan kepesertaan yang bersifat wajib.

### **b. BPJS Kesehatan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

Pada awalnya lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia adalah lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia yang kemudian menjadi BPJS Kesehatan. Pada awal 2013, PT Askes Menjadi BPJS Kesehatan. BPJS diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya (Janis, 2014).

Namun dalam praktiknya sebenarnya masih banyak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan BPJS dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan berdasarkan keselamatan pasien, efektivitas dan efisiensi, dan berorientasi pada pasien, serta kepuasan pasien antara pasien yang menggunakan BPJS dan umum (tidak menggunakan BPJS) (A. Pertiwi, 2017).

Ladahan Hukum BPJS Kesehatan :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang (UU) tentang BPJS Kesehatan adalah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. UU ini mengatur mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan, besaran iuran yang harus dibayarkan, manfaat jaminan kesehatan, serta pengelolaan dana yang terkumpul dari iuran peserta untuk membiayai pelayanan kesehatan.

Salah satu tujuan dari UU ini adalah untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan nasional yang terintegrasi dan berkeadilan, serta memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih yang kurang mampu secara ekonomi.

Dalam UU ini juga diatur bahwa peserta BPJS Kesehatan terdiri dari seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai peserta, baik itu sebagai pekerja formal maupun non-formal, peserta mandiri, dan peserta penerima bantuan iuran. penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan diharapkan

dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tanpa harus khawatir dengan biaya yang mahal.

### c. Pekerja Sektor Formal

Sektor Usaha Formal adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Badan usaha tersebut apabila dilihat di kantor pajak maupun kantor perdagangan dan perindustrian terdaftar nama dan bidang usahanya (Hestanto; 2016).

Pasar tenaga kerja terdiri dari dua pasar yang berbeda, yaitu pasar tenaga kerja primer (sektor formal) dan pasar tenaga kerja sekunder (sektor informal). Pekerja sektor formal cenderung memiliki pekerjaan yang stabil, dengan gaji yang lebih tinggi dan jaminan sosial, sedangkan pekerja sektor informal cenderung memiliki pekerjaan yang tidak, (*Teori Dual Labor Market oleh Peter Doeringer dan Michael Piore*).

Pekerja sektor formal adalah pekerja yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan formal, seperti memiliki izin usaha, memiliki dokumen resmi seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), memiliki NPWP, dan lain sebagainya. Pekerja sektor formal biasanya mendapatkan gaji yang tetap setiap bulannya dan terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diperuntukkan bagi para pekerja formal dan keluarganya. Program ini mencakup asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, dan program pensiun. Peserta program BPJS Ketenagakerjaan membayar iuran bulanan yang ditentukan berdasarkan gaji atau penghasilan yang diterima. Program ini bertujuan untuk melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja, cacat, dan meninggal dunia.

Sedangkan program BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia dan warga asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pekerja sektor formal. Peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori, yaitu peserta mandiri dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pekerja sektor formal yang menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan membayar iuran bulanan yang ditentukan berdasarkan gaji atau penghasilan yang diterima. Sedangkan pekerja sektor formal yang menjadi peserta PBI tidak membayar iuran BPJS Kesehatan, karena iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Sebagai pekerja sektor formal, sangat penting bagi seseorang untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dengan menjadi peserta program ini, pekerja akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan

kerja, cacat, dan meninggal dunia serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Selain itu, keikutsertaan dalam program ini juga merupakan kewajiban bagi pekerja sektor formal sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

#### d. Pekerja Sektor Informal

Pengertian sektorinformalsering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjaannya terutama berasal dari tenaga keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumberdaya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah kebaah, pendidikan dan kualitas sumberdaya pelaku tergolong rendah. (Direktorat Ketenaga Kerjaan ; 2019).

Meskipun tidak memiliki akses ke program-program jaminan sosial formal, pekerja sektor informal tetap membutuhkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, sakit, dan risiko-risiko lainnya yang terkait dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menyediakan program-program jaminan sosial yang khusus ditujukan untuk pekerja sektor informal.

Salah satu program jaminan sosial yang diperuntukkan bagi pekerja sektor informal adalah program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Mandiri. Program ini menyediakan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja sektor informal dan keluarganya. Jamsostek Mandiri juga menawarkan program asuransi kesehatan yang terjangkau bagi pekerja sektor informal, meskipun cakupannya masih terbatas.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan program-program bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin, termasuk pekerja sektor informal. Program-program bantuan sosial ini mencakup program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja sektor informal, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperluas cakupan program-program jaminan sosial dan memperkuat implementasinya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperkenalkan program Jaminan Sosial Prasejahtera (Jamspra), yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja di sektor informal yang belum terlindungi oleh program-program jaminan sosial formal.

### **3. Assesmen**

#### **a. Identifikasi Masalah**

Masalah diperlukan untuk mengetahui uraian masalah yang dibahas. Proses identifikasi dilakukan dengan cara menjelaskan berbagai poin penting yang berkaitan dengan masalah hingga nantinya mempengaruhi jenis penyelesaian yang

akan dirancang. Dalam hal ini praktikan, melakukan proses penelusuran melalui pengumpulan data dan informasi melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi dari berbagai sumber terkait.

Sebelum mencari dan menggali informasi mengenai isu atau masalah pada profil ke – 1 yaitu jaminan sosial di kelurahan sukapura, praktikan melakukan inisiasi sosial terlebih dahulu dengan melaksanakan kunjungan ke kantor kelurahan sukapura. Esoknya praktikan melakukan transect walk kepada 4 Rukun Warga (RW) yang ada di kelurahan sukapura yaitu Rukun Warga (RW) 05, 06, 07 dan 12 dengan menyusuri jalan di Rukun Warga (RW) tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dan masyarakatnya. Setelah itu praktikan melakukan community involvement di RW 05 kelurahan sukapura dengan ikut dalam kegiatan posyandu dan berinteraksi untuk menggali informasi. Kemudian esoknya praktikan melakukan home visit dengan teknik wawancara kepada ketua RW 06 di kelurahan sukapura untuk mendapatkan isu atau masalah terkait jaminan sosial.

Untuk melakukan analisis serta identifikasi masalah, praktikan menggunakan teknik wawancara ketika melakukan home visit kerumah RW – RW di kelurahan Sukapura. Dalam identifikasi masalah yang dilakukan yaitu :

1. Wawancara dengan ketua RW 05, 06, 07 dan 12 pada tanggal 08 – 10 Februari 2023 dengan teknik home visit
2. Wawancara dengan pak irwan ketua RW 06 pada tanggal 12 februari 2023 dengan teknik home visit
3. Wawancara dengan pekerja sektor informal pada tanggal 13 februari 2023 dengan teknik home visit

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait analisis jaminan sosial adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait keaktifan kartu BPJS Kesehatan

Berdasarkan pernyataan dari pak irwan selaku ketua RW 06 kelurahan sukapura pada wawancara tanggal 12 Februari 2023 dari hasil wawancara telah didapatkan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan, lalu jika ada anggota keluarga yang sakit dan belum menjadi peserta atau kartu mereka mati, kebanyakan warga masih gengsi meminta bantuan.

2. Masyarakat belum mengetahui bagaimana menjadi kepesertaan BPI

Berdasarkan penuturan dari pak udin Pada wawancara tanggal 13 feb 2023, ia selaku mantan karyawan swasta dan sekarang berprofesi sebagai pedangang mengatakan bahwa ia belum mengetahui apa itu PBI dan bagaimana merubah status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran).

### 3. Kurangnya sosialisasi terkait PBI

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara pak irwan selaku ketua RW 06 kelurahan sukapura pada wawancara 12 februari 2023 dan pak udin selaku pekerja sektor informal pada wawancara 13 feb 2023, belum adanya kegiatan mengenai sosialisasi tentang PBI (Penerima Bantuan Manfaat) di RW 06 kelurahan sukapura, kecamatan kiaracondong, kota bandung, provinsi jawa barat.

### 4. Kurangnya angka partisipasi BPJS Kesehatan pada pekerja sektor informal

Berdasarkan penuturan dari ketua RW 06 kelurahan sukapura pada wawancara tanggal 12 februari 2023, hampir semua pekerja sektor informal (Eks pekerja formal swasta) tidak merubah status kepesertaan mereka menjadi PBI dan mandiri, hal ini dikarenakan kurangnya wawasan mereka terkait PBI dan tidak mampu membayar jika berstatus mandiri.

Masyarakat di RW 06 kelurahan sukapura yang dulunya pekerja sektor formal swasta namun mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berahli menjadi pekerja sektor informal dan hampir semua dari mereka tidak mengganti status kepesertaan mereka menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Mandiri. Hal ini menyebabkan kartu BPJS Kesehatan mereka menjadi tidak aktif dan menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial.

Berdasarkan hasil assessment tersebut, maka dapat diketahui bahwa :

#### 1. Penyebab Masalah

Penyebab permasalahan yang ada yaitu kurangnya sosialisasi terkait PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait keaktifan kartu BPJS Kesehatan (Poin 1 & 2). Ditambah lagi masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana menjadi kepesertaan dengan status PBI (Penerima Bantuan Iuran) (Poin 2), sehingga menyebabkan kurangnya angka partisipasi masyarakat pekerja sektor informal pada program BPJS Kesehatan.

#### 2. Dampak Masalah

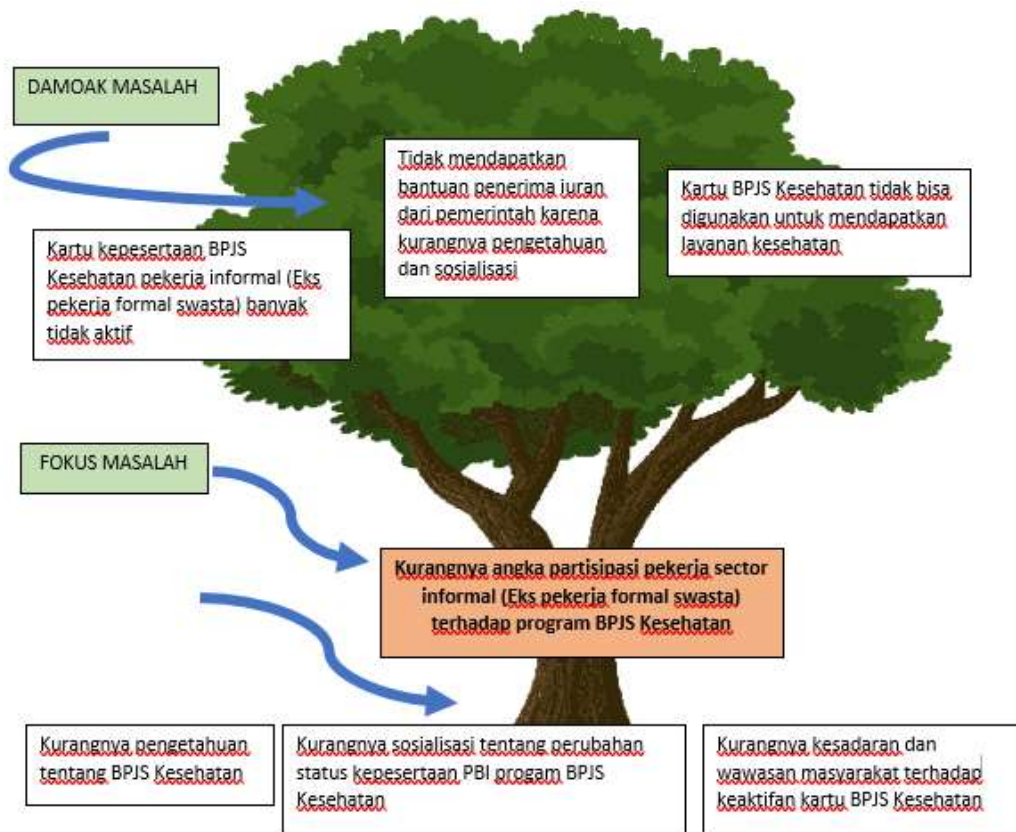
Dampak masalah yang dapat ditimbulkan akan menurunnya tingkat kesejahteraan peserta dan keluarga apabila tidak mengaktifkan kembali kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Pada permasalahan menurunnya angka partisipasi pekerja sektor informal (Eks pekerja formal swasta) (Poin 4). Dampak masalah lain yaitu kurangnya kontribusi dari pihak stakeholder dalam mengkritisi permasalahan ini, terlihat dari kurangnya sosialisasi Bantuan Penerima Iuran (PBI) menyebabkan masyarakat kurang memahami bagaimana cara mencari peserta Bantuan Penerima Iuran (PBI).

#### 3. Fokus Masalah

Jika dilihat penyebab utama pada permasalahan tersebut ada dua yaitu kurangnya sosialisasi terkait PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait keaktifan kartu BPJS Kesehatan, serta dampak utama yang akan ditimbulkan jika masalah ini tidak diatasi yaitu memperburuk pekerja sektor informal (Eks pekerja formal swasta) dan keluarganya apabila kepala keluarga mengalami kejadian yang bersiko tanpa kepesertaan BPJS Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa fokus masalah yang dikaji yaitu terkait dengan kurangnya angka partisipasi BPJS Kesehatan pada sektor informal.

Banyak dari pekerja informal (Eks pekerja formal swasta) di RW 06 kelurahan sukapura tidak mengetahui dan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi pada mereka sehingga membiarkan kartu BPJS Kesehatan mereka tidak aktif.

Adapun focus masalah dikaji melalui tools analisis pohon masalah :



Gambar 2.1 Pohon Masalah Isu Jaminan Sosial

**KETERANGAN :**

Dari pohon masalah di atas, dapat terlihat bahwa inti masalah pada penelusuran yang telah dilakukan praktikan di kelurahan sukapura yakni kurangnya angka partisipasi pekerja sektor informal (Eks pekerja formal swasta) terhadap program

BPJS Kesehatan. Terdapat beberapa penyebab terjadinya penurunan angka partisipan masyarakat pada program BPJS Kesehatan di kelurahan sukapura yaitu: (1) Kurangnya pengetahuan tentang BPJS Kesehatan, (2) Kurangnya sosialisasi tentang perubahan status kepesertaan PBI program BPJS Kesehatan, (3) Kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat terhadap keaktifan kartu BPJS Kesehatan, sehingga menyebabkan dampak masalah yaitu : (1) status kepesertaan BPJS Kesehatan pekerja informal (Eks pekerja formal swasta) banyak tidak aktif, (2) tidak mendapatkan bantuan penerima iuran (BPI) dari pemerintah karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, dan (3) kartu BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

#### **b. Identifikasi Kebutuhan**

Melihat pada penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah yang mana penyebab utama masalah ini yaitu kurangnya sosialisasi tentang status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di kelurahan sukapura lalu penyebab lain yaitu kurangnya pengetahuan tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kurangnya kesadaran akan pentingnya BPJS Kesehatan. Maka diperlukan penyuluhan tentang penerima bantuan iuran (PBI) dan kesadaran tentang pentingnya mengaktifkan kartu BPJS Kesehatan. Selain itu diperlukan sosialisasi terkait simulasi pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Mandiri secara offline maupun online agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana tata cara mengaktifkan lagi kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif dan merubah status kepesertaan. Jika memang masyarakat tetap tidak mengerti dan merasa akan mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran atau pergantian status, maka pekerja sosial memfasilitasi proses pendaftaran dan pergantian status kepesertaan BPJS Kesehatan secara online maupun offline dan masyarakat menyiapkan dokumen yang diperlukan sehingga proses pendaftaran dan pergantian status bisa dibantu oleh pekerja sosial.

#### **d. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial**

##### **1. Sistem sumber informal**

Bentuk dari sumber ini yaitu keluarga, teman, tetangga, ataupun orang yang dapat memberikan bantuan kepada para pekerja sektor informal tersebut.

##### **2. Sistem sumber formal**

Bentuk dari sistem sumber formal yaitu PKK.

##### **3. Sistem sumber kemasyarakatan**

Bentuk dari sistem sumber kemasyarakatan dalam hal ini yaitu dinas sosial kota Bandung, BPJS Kesehatan kota Bandung, Rumah Sakit Umum Kota Bandung, dan Puskesmas kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

#### **4. Rencana Intervensi**

##### **a. Latar Belakang**

Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial, baik itu berupa jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Namun berdasarkan assement di kelurahan sukapura, terdapat permasalahan dimana hampir semua pekerja sektor informal (Eks pekerja formal swasta) tidak mengaktifkan kartu BPJS Kesehatan mereka. Mereka tidak terlalu mengetahui bagaimana mekanisme mengubah status kepesertaan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program BPJS Kesehatan. Seharusnya mereka pekerja sektor informal yang dulunya bekerja sebagai karyawan swasta dapat mengaktifkan kartu mereka lagi dengan berubah status kepesertaan mereka menjadi Penerima bantuan iuran (PBI) atau mandiri jika ingin mengaktifkan kartu mereka lagi.

Dengan adanya masalah tersebut, maka dibutuhkan program sosialisasi dan pendampingan kepesertaan program BPJS Kesehatan yang memanfaatkan sistem sumber informal berupa keluarga, teman, tetangga, ataupun orang yang dapat memberikan bantuan kepada para pekerja sektor informal tersebut. Lalu sistem formal berupa kelompok pekerja tani dan pedangan. Kemudian sistem sumber kemasyarakatan berupa Dinas Sosial Kota Bandung, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kota Bandung, dan Puskesmas Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Dengan rangkaian berupa kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan tanya jawab tentang jaminan sosial dan urgensinya untuk kelompok rentan khususnya pekerja sektor informal, penyuluhan dan tanya jawab tentang konsep status kepeserta BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan upaya perlindungannya.

##### **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Adapun tujuan umum yang akan diperoleh yaitu :

1. Memberikan wawasan kepada Pekerja Sektor Informal (Eks Pekerja Sektor Formal Swasta) terkait mengaktifkan kartu BPJS Kesehatan mereka kembali merupakan hal yang sangat penting.
2. Meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Tujuan khusus yang akan diperoleh yaitu :

1. Meningkatkan kembali kontribusi kepesertaan masyarakat terhadap program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan.
2. Meningkatkan pemahaman pekerja sektor informal (Eks pekerja formal swasta) terkait perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI)

### c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam melakukan tindak lanjut terhadap Masyarakat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang bernama “ **Sosialisasi Penguatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan**”. Sosialisasi Program BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang belum cukup mengetahui tentang status kepesertaan BPJS Kesehatan”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat kelurahan sukapura bersama-sama meningkatkan pemahaman mengenai BPJS Kesehatan, utamanya yang menerima bantuan iuran sehingga kelak mereka tidak mengalami kejadian penonaktifan status kepesertaan lagi hingga tidak dapat menggunakan layanan kesehatan secara gratis.

*Table 2.2 Bentuk Kegiatan Program Penyuluhan Kepesertaan BPJS Kesehatan*

No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Narasumber
1.	Penyuluhan dan tanya jawab tentang jaminan sosial berserta programnya.	Masyarakat memahami konsep jaminan sosial berserta programnya	Dinas Sosial Kota Bandung
2.	Penyuluhan dan tanya jawab tentang perubahan status BPJS Kesehatan	Masyarakat paham tentang konsep BPJS Kesehatan seserta dengan upaya perlindungannya	Rumah sakit umum Kota Bandung & Puskesmas kecamatan kiaracandong
3.	Penyuluhan dan tanya jawab tentang pergantian perubahan status BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Masyarakat memahami bagaimana mekanisme pergantian perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan Kecamatan Kiaracandong
4.	Fasilitasi pendaftaran kepesertaan PBI BPJS Kesehatan secara online maupun offline agar mempermudah masyarakat.  (Masyarakat membawa dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran peserta	Meningkatnya angka kepesertaan BPJS Kesehatan di kelurahan sukapura	Praktikan sebagai pekerja sosial

	Penerima Bantuan Iuran (PBI)		
--	------------------------------	--	--

#### d. Sistem Partisipan

Adapun sasaran program dalam pelaksanaan “**Sosialisasi Penguatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan**” yang akan dilaksanakan di kelurahan sukapura, kecamatan kiaracandong, kota bandung yaitu :

**Table 2.3 Sistem Partisipan Program Sosialisasi BPJS Kesehatan**

No.	JENIS SISTEM	SISTEM REPRESENTATIF
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change agent system	Pekerja Sosial
3.	Client System	a) Masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang kartu BPJS-nya tidak aktif b) Masyarakat peserta PBI BPJS Kesehatan non-aktif
4.	Support System	a) BPJS Kesehatan cabang kota bandung b) Rumah sakit Umum Kota Bandung c) Dinas Sosial Kota Bandung d) Puskesmas Kecamatan Kiaracandong
5.	Controlling System	BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandung
6.	Implementing System	a) Pekerja sosial b) Masyarakat kelurahan sukapura peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) c) Pemerintah kelurahan sukapura d) Dinas Sosial Kota Bandung e) BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandung f) Puskesmas kecamatan kiaracandong g) Rumah sakit umum kota bandung
7.	Target System	Masyarakat kelurahan sukapura peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI)
8.	Action System	a) Pekerja Sosial b) BPJS Kesehatan Kota Bandung c) Dinas Sosial Kota Bandung d) Pemerintah kelurahan sukapura e) Puskesmas kecamatan kiaracandong

#### **e. Metode dan Teknik**

Dalam pelaksanaan program “**Sosialisasi Penguatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan**”, metode yang akan digunakan adalah community organization dan community development (CO/CD) yang merupakan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk teknik yang akan digunakan adalah penyuluhan dan fasilitasi.

##### **1. Penyuluhan**

Penyuluhan yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan menyebarkan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya. Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

##### **2. Fasilitasi**

Fasilitasi merupakan teknik untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitatornya merupakan pekerja sosial atau praktikan. Pekerja sosial akan membantu masyarakat dan memfasilitasi proses pendaftaran PBI BPJS Kesehatan secara offline maupun Online. Strategi yang digunakan adalah strategi kolaborasi dan kampanye, dimana pekerja sosial berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuat sistem sasaran setuju dengan sistem kegiatan, bahwa perubahan dibutuhkan dan di dukung pengalokasian sumber. Adapun taktik yang digunakan yaitu implementasi dan edukasi.

#### **f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan**

Rencana intervensi yang ideal memerlukan rancangan anggaran yang baik serta mampu menutupi kebutuhan kegiatan intervensi. Untuk pelaksanaan kegiatan “Forum PBI Sukapura” berikut rancangan anggaran yang sudah disusun.

**Table 2.4 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Sosialisasi Kepesertaan Program BPJS Kesehatan**

No.	Nama Item	Volume	Jenis Satuan	Harga @	Jumlah
1.	Print proposal	2	Buah	Rp.20.000	Rp. 40.000
2.	Print surat undangan	50	Buah	Rp. 150	Rp. 7.500
3.	Cetak banner	1x2.5	Meter	Rp.60.000	Rp.60.000
4.	ATK	1	Paket	Rp.35.000	Rp.35.000
5.	Honoratium narasumber	2	Orang	Rp.900.000	Rp.1.800.000
6.	Snack peserta	50	Paket	Rp.5.000	Rp.250.000
7.	Snack narasumber	2	Paket	Rp.20.000	Rp.40.000
8.	Makan siang narasumber	2	Buah	Rp.20.000	Rp.40.000
9.	Transpotasi narasumber	2	Orang	Rp.150.000	Rp.300.00
<b>TOTAL</b>					<b>Rp.2.572.00</b>

Bahan dan alat yang akan digunakan dalam kegiatan “Forum PBI Sukapura” yaitu sebagai berikut : (1) LCD Proyektor; (2) Layar Proyektor; (3) Laptop; (4) Buku; (5) Pulpen; (6) Meja; (7) Kursi; (8) Banner; (9) Wireless Speaker; (10) Microphone

**g. Analisis Kelayakan Program**

Analisis kelayakan program yang digunakan dalam Program “**Sosialisasi Penguatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan**” yaitu analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu penilaian manajemen mengenai Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

**Table 2.5 Analisis SWOT Kegiatan Sosialisasi Kepesertaan Program BPJS Kesehatan**

<b>Faktor Internal</b>	<b>S (strength)</b> 1. Program ini dapat memberikan pemahaman mengenai teknis layanan dan regulasi BPJS PBI kepada masyarakat peserta BPJS PBI di kelurahan sukapura  2.Masyarakat memutuhkan informasi mengenai layanan BPJS PBI ini agar tidak terjadi lagi masalah kurangnya kotribusi pekerja sektor	<b>W (weakness)</b> Tidak semua peserta pekerja sektor informal menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI
	<b>Faktor Eksternal</b>	

	informal pada program BPJS Kesehatan	
<b>O (opportunity)</b> Adanya dukungan dari, Dinas Sosial dan pemerintah kelurahan sukapura memahami ketentuan BPJS Kesehatan	<b>Strategi SO</b> Berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah desa untuk dapat membantu penyampaian informasi mengenai regulasi baru penyelenggaraan BPJS Kesehatan PBI dalam kegiatan ini.	<b>Strategi WO</b> Melakukan sosialisasi secara berkelompok atau dengan sistem shift
<b>T (threat)</b> Banyaknya pekerja sektor informal yang tidak mampu membayar iuran sehingga kemungkinan tidak semua pekerja sektor informal tersebut menjadi peserta PBI	<b>Strategi ST</b> Menyebarkan informasi singkat mengenai kegiatan via media sosial untuk menghindari kontak	<b>Strategi WT</b> Menerapkan protokol kesehatan ketat dalam kegiatan sosialisasi dan memilih area terbuka

Dari analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan kegiatan penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kepesertaan program BPJS Kesehatan layak dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada kekuatan kegiatan ini yakni dapat memberikan pemahaman mengenai teknik layanan dan regulasi kepesertaan BPJS Kesehatan kepada masyarakat dan masyarakat membutuhkan informasi mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan ini agar tidak terjadi kurangnya partisipasi kepesertaan di masyarakat kelurahan sukapura.

Adapun indikator keberhasilan pada program ini yaitu ;

1. Masyarakat kelurahan sukapura mengerti bahwa berkontribusi pada program BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajib.
2. Masyarakat mengetahui tentang pergantian status kepesertaan BPJS Kesehatan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat kelurahan seukapura pada program BPJS Kesehatan

#### **h. Jadwal dan Langkah-Langkah**

Berikut jadwal dan langkah-langkah program kegiatan “**Sosialisasi Penguatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepesertaan BPJS Kesehatan**” yang dicantumkan dalam tabel berikut:

**Table 2.6 Jadwal dan Langkah – langkah Kegiatan Sosialisasi Kepesertaan Program BPJS Kesehatan**

No.	Nama Kegiatan	Maret		April			
		Pelaksanaan Minggu Ke-					
		III	IV	I	II	III	IV
1.	Melakukan prakondisi penyuluhan dengan menentukan masalah, kebutuhan, dan prioritas masalah	V					
2.	Menyusun rencana kerja penyuluhan		V				
3.	Menyusun materi penyuluhan sosial			V			
4.	Melakukan koordinasi dengan sistem sumber terkait (Pemerintah kelurahan, BPJS Kesehatan)			V			
5.	Menyiapkan media dan sarana prasarana yang akan digunakan				V		
6.	Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi					V	
7.	Pelaksanaan penyuluhan secara langsung					V	
8.	Evaluasi kegiatan						V

## B. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

### 1. Gambaran Masalah

Berdasarkan data praktikan peroleh dari data Ketua RW 06 Kelurahan Sukapura tahun 2023 berikut rincian dana pengeluaran swadaya masyarakat dengan 648 KK membayar iuran sebanyak Rp.7.000/Bulan unruk dan swadaya masyarakat

*Table 2.7 Rencana Anggaran Pengeluaran Wajib Dana Swadaya Masyarakat di RW 06 Kelurahan Sukapura*

No	Dana Swadaya Masyarakat	Nominal Santunan / Bulan
1.	LINMAS	Rp.150.000
2.	PKK	Rp.300.000
3.	Santunan Kematian	Rp.300.00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 750.000</b>

Swadaya masyarakat untuk pembangunan di kelurahan sukapura adalah salah satu bentuk partisipasi warga masyarakat di kelurahan sukapura untuk pembanguann infrastruktur kelurahan yang kemudian dijadikan salah satu sumber pendapatan kelurahan. Swadaya masyarakat untuk pembangunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap warga masyarakat kelurahan sukapura yang sudah terdaftar dalam daftar kepala keluarga, terkecuali bagi kepala keluarga yang dikategorikan dibawah garis kemiskinan, jompo dan fakir miskin dibebaskan dari kewajiban tersebut karena pengabdian nya.

Dari hasil assessment praktikan dengan menggunakan teknologi home visit ke RW 06 kelurhaan sukapura bahwa dana sdwaya masayarakat tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 1) Linmas, 2)PPK, dan 3) Santunan Kematian. Terdapat 648 Kepala keluarga di RW 06 kelurahan sukapura yang wajib berkontribusi dalam swadaya masyaarkat. Namun dari hasil wawancara yang praktikan dapat dari pak irwan selaku ketua RW 06 Kelurahan Sukapura menyebutkan bahwa terdapat perselisihan dana yang menjadi protes masyarakat. Dana swadaya yang seharusnya digunakan untuk dana Linmas, PKK, dan santunan kematian digunakan untuk keperluan lain seperti biaya konsumsi. Hal ini megakibatkan bahwa kurangnya komunikasi dalam pembagian dana untuk keperluan pembanguan RW 06 kelurahan sukapura yang banyak menimbulkan kericuhan.

### 2. Tinjauan Konsep

#### a. Kajian bantuan sosial

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat

peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Beberapa teori yang terkait dengan bantuan sosial antara lain:

- 1) Teori Kemiskinan: Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena kurangnya akses dan penghasilan yang memadai, yang kemudian berdampak pada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dalam hal ini, program bantuan sosial bertujuan untuk memberikan bantuan finansial atau akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan untuk membantu keluar dari kemiskinan.
- 2) Teori Empowerment: Teori ini fokus pada memberikan bantuan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengontrol kehidupan mereka sendiri. Program bantuan sosial yang memanfaatkan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
- 3) Teori Keadilan Sosial: Teori ini menekankan pada pentingnya memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan peluang yang memadai. Dalam hal ini, program bantuan sosial dapat membantu menyeimbangkan kesenjangan dan mengurangi ketimpangan sosial.
- 4) Teori Efisiensi: Teori ini menekankan pentingnya memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini, program bantuan sosial harus dirancang dan diimplementasikan dengan baik untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada penerima bantuan.

Beberapa undang-undang terkait bantuan sosial di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin: Undang-undang ini mengatur tentang mekanisme penanganan fakir miskin, termasuk pemberian bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak perempuan, termasuk hak atas pemberian bantuan sosial yang setara dengan laki-laki.

- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Undang-undang ini mengatur tentang peningkatan akses terhadap bantuan sosial, termasuk bantuan sosial bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas.
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Undang-undang ini mengatur tentang mekanisme jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk program-program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- 5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bertugas menyelenggarakan program-program jaminan sosial, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan bantuan sosial dalam bentuk kesehatan.

b. Konsep dana swadaya masyarakat

Dana swadaya adalah konsep dimana masyarakat mengumpulkan dana dari diri sendiri atau dari kelompoknya, kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat atau kepentingan bersama. Konsep ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang tersedia dari pemerintah atau lembaga lainnya dalam membiayai berbagai kegiatan sosial dan kepentingan bersama.

Dalam praktiknya, dana swadaya dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sumbangan sukarela, hasil penggalangan dana, atau dari sumbangan berbasis komunitas. Dana tersebut kemudian dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab, seperti organisasi atau badan swadaya masyarakat (LSM), dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah disepakati bersama.

Salah satu contoh penerapan konsep dana swadaya adalah dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan sekitar. Misalnya, masyarakat di suatu desa dapat mengumpulkan dana swadaya untuk membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Dana swadaya dapat membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan memperkuat kemandirian masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa dana swadaya tidak dapat menggantikan peran pemerintah atau lembaga lainnya dalam membiayai berbagai kegiatan sosial dan kepentingan bersama.

### **3. Assesmen**

#### **a. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah diperlukan untuk mengetahui uraian masalah yang dibahas. Proses identifikasi dilakukan dengan cara menjelaskan berbagai poin penting yang berkaitan dengan masalah sehingga nantinya memperengaruhi jenis penyelesaian yang akan dirancang. Dalam hal ini praktikan, melakukan proses penelusuran melalui pengumpulan data dan informasi melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi dari berbagai sumber terkait.

##### **1) Penyebab Masalah**

Berdasarkan informasi yang praktikan dapatkan dari hasil wawancara pak irwan selaku ketua RW 06 Kelurahan Sukapura menyebutkan bahwa terdapat pro kontra dalam menggunakan dana swadaya masyarakat. Pak irwan mengatakan bahwa meskipun dana swadaya masyarakat di pakai untuk 3 dana yakni pembayaran gaji LINMAS, PKK, dan santunan kematian bagi masyarakat, namun keperluan lain juga perlu diperhatikan seperti biaya konsumsi dalam pertemuan rapat seluruh RT yang diadakan oleh RW.

Penggunaan dana yang tidak sesuai tadi menyebabkan pro kontra bagi masyarakat, padahal bukti – bukti pembelanjan biaya tersebut ada. Namun pihak masyarakat menyebutkan bahwa ketua RW tidak menggunakan dan swadaya sebagaimana mestinya.

Melihat permasalahan yang ada praktikan bisa menyimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antar RW dengan warga menyebabkan pra sangka buruk bagi warga. Dana yang digunakan pak RW untuk keperluan lain sebetulnya tidaklah salah tetapi hanya saja dana swadaya masyarakat untuk keperluan 3 tadi yakni dana untuk LINMAS, PKK, dan Satuan Kematian.

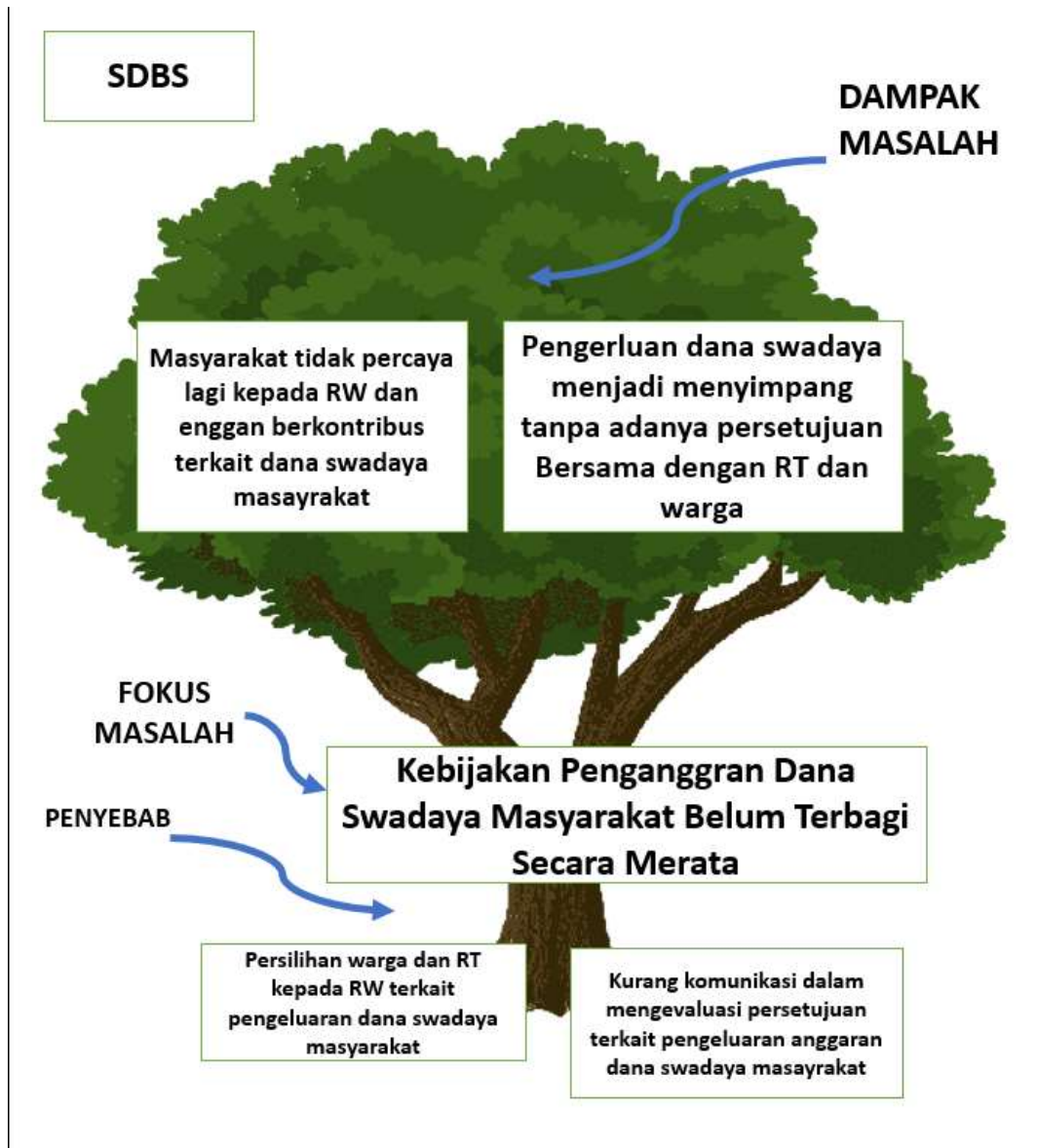
##### **2) Dampak Masalah**

Dampak masalah yang ditimbulkan akan menyebabkan masyarakat kurang percaya kepada ketua RW 06 kelurahan sukapura sehingga menyebabkan masyarakat enggan berkontribusi pada untuk membayar iuran dan aswadaya masyarakat untuk pembangunan di kelurahan sukapura.

##### **3) Fokus Masalah**

Jika dilihat penyebab utama pada permasalahan tersebut yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi ketua RW 06 dengan masyarakat menyebabkan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada ketua RW 06 dalam mengelola dan swadaya masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru yakni masyarakat enggan berkontribusi dalam membayar iuran dana swadaya masyarakat.

Adapaun fokus masalah dikaji melalui tools analisi pohon masalah :



Gambar 2.2 Pohon Masalah Isu Sumber Dana Bantuan Sosial

#### KETERANGAN :

Berdasarkan analisi tools pohon masalah tersebut, fokus masalah yang diambil terkait Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS) di Kelurahan Sukapura adalah kebijakan penganggaran dana swadaya masyarakat belum terbagi merata. Penyebab utama kurangnya komunikasi dalam mengevaluasi persetujuan terkait pengeluaran anggaran dana swadaya masyarakat. Selanjutnya ditambahkan dengan penyebab lainnya yakni terjadi perselisihan warga dan RT kepada RW terkait pengeluaran dana

swadaya masyarakat, sehingga menyebabkan dampak masalah yakni pengeluaran dana dianggap menyimpang dikarenakan tanpa adanya persetujuan warga dan RT serta dampak lainnya adalah masyarakat menjadi kurang percaya kepada RW dalam mengelolah dana swadaya masyarakat sehingga enggan untuk berkontribusi dalam dana swadaya masyarakat.

Dalam analisis pohon tersebut dapat dikatakan bahwa kurangnya komunikasi dalam persetujuan penganggaran terkait kebutuhan untuk keperluan masyarakat dapat menyebabkan pro kontra dan perselisihan antara masyarakat dan RT kepada RW dalam mengelolah dana swadaya, serta menyebabkan menurunkan kepercayaan dan pendapatan dana kelurahan untuk warga menjadi berkurang.

#### **b. Identifikasi Kebutuhan**

Melihat pada penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah yang mana penyebab utama masalah ini adalah Kurangnya komunikasi Kebijakan dalam persetujuan menggunakan anggaran dana swadaya masyarakat belum terbagi secara merata. Penyebab lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari RW, RT dan warga dalam mengelolah dana swadaya masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru dan menyebabkan dampak berkurangnya sumber dana swadaya masyarakat untuk pembangunan di kelurahan sukapura. Maka diperlukan program khusus terkait pengelolaan keuangan serta pemanfaatan dana swadaya masyarakat dengan mengatur prioritas kebutuhan sesuai dengan komponen tanpa menggunakan dana yang untuk keperluan lain.

#### **c. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial**

##### **1. Sistem sumber informal**

Bentuk dari sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu nasihat dari kelurgra dan teman di masyarakat RW 06 Kelurahan Sukapura terkait dengan pengelolaan dana swadaya masyarakat.

##### **2. Sistem sumber formal**

Bentuk dari sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu Ketua Rukun Warga (RW) dan seluruh Rukun Tetangga (RT) di RW 06 Kelurahan Sukapura.

##### **3. Sistem sumber kemasyarakatan**

Bentuk dari sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu Kelurahan Sukapata, Kecamatan Kiarcondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Manager CSR PT.PINDAD

#### **4. Rencana Intervensi**

##### **a. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil assessment di RW 06 Kelurahan Sukapura, bahwa pengelolaan dana swadaya masyarakat tidak dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Penyebab utama adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara RW dengan RT dan warga dalam mengelolah dana swadaya masyarakat beserta dengan skala prioritasnya. Penyebab lainnya kurangnya kesadaran tentang pemanfaatan dana swadaya masyarakat dari pengelolahnya yakni ketua RW tidak menyadari dampak yang terjadi dari pengelolaan keuangan yang salah.

Maka dari itu dibutuhkan program penguatan ekonomi dalam pengelolaan dana swadaya masyarakat yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem sumber informal berupa saran dan nasihat dari keluragra dan teman RW, RT, Kepala Keluarga terkait dengan pengelolaan dana swadaya masyarakat. Lalu sistem sumber formal berupa ketua RW dan seluruh RT di RW 06 Kelurahan Sukapura dalam pertemuan forum yang membahas pengelolaan anggaran dana swadaya masyarakat. Kemudian sistem sumber kemasyarakatan berupa Kelurahan Sukapura. Dengan kegiatan berupa forum mengelilah dana sesuai dengan komponen kebutuhan di masyarakat, praktik penyusunan anggran dana keuangan swadaya masyarakat, sesi diskusi dan konsultasi.

##### **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Adapun tujuan bentuk yang akan diperoleh yaitu :

1. Memberikan pemahaman kepada RW, RT, dan masyarakat (diwakilkan setiap Kepala Keluraga) terkait forum diskusi pengelolaan dana swadaya masyarakat.
2. Memberikan pengetahuan tentang pengaturan skala prioritas dana swadaya masyarakat terkait kebutuhan apa saja dalam menggunakan dana tersebut.

Tujuan khusus yang akan diperoleh yaitu :

1. Dapat mengubah stigma negative di masyarakat terkait penggunaan dana swadaya masyarakat yang semula tidak mengelola dana dengan semesetinya menjadi sesuai dengan tujuan dibentuknya dana swadaya masyarakat.
2. Menubuhkan rasa jiwa rajin untuk berkontribusi dalam dana swadaya masyarakat

##### **c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Nama program ini yaitu “**Forum Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**”. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi dan capacity building kepada RW, RT, dan masyarakat (diwakilkan seluruh kepala kelurga). Untuk sasaranya yaitu RW, RT, dan masyarakat di RW 06 Kelurahan Sukapura yang terdiri dari Ketua RW 06 , 10 RT, dan 648 Kepala Keluarga (dipilih 20 KK sebagai perwakilan) yang sudah dipilih sebagai client system.

Adapun kegiatan dalam program ini yaitu :

1. Pelatihan Mengelola Dana Sesuai dengan Kebutuhan di Masyarakat

Dalam hal ini, pihak kelurahan sebagai wadah kegiatan forsum tersebut memberikan penjelasan terkait dengan untuk apa saja dana swadaya masyarakat dipergunakan dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat.

2. Praktik Penyusunan Anggaran Keuangan Dana Swadaya Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada client system terkait dengan bagaimana cara membuat anggran keuangan dana swadaya masyarakat secara rinci dan sederhana.

3. Sesi Diskusi dan Konsultasi

Kegiatan ini dilakuakn dengan melaksanakn diskusi dan konsultasi. Para clinet system dapat berdiskusi dan mengkonsultasikan keluhan dan kencanaapa aja yang mereka alami dalma pengeloaan keuangan dana swadaya masyarakat sehingga mendapatkan saran dan solusi.

**Table 2.8 Bentuk Kegiatan Program Forum Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Narasumber / Instruktur
1.	Pelatihan Mengelola Dana Sesuai Dengan Kebutuhan di masyarakat terkait dana swadaya masyarakat	Client system dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana swadaya masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan	CSR PT.PINDAD
2.	Praktik Penyusunan Anggran Keuangan Dana Swadaya Masyarakat	Client System dapat mengerti bagaimana caranya membuat suatu penyusunan anggran keuangan dalam dana swadaya masyarakat	CSR.PT PINDAD
3.	Sesi Diskusi dan Konsultasi	Client System dapat bersikusi dan berkonsultasi mengenai kendala – kendala yang mereka alami dalam pengelolaan keuangan dana swadaya masyarakat	Pekerja Sosial

#### d. Sistem Partisipan

Adapun sasaran program dalam pelaksanaan “**Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**” yang akan dilaksanakan di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung yaitu :

**Table 2.9 Sistem Partisipan Program Forum Diskusi Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**

No.	JENIS SISTEM	SISTEM REPRESNTATIF
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change agent system	Pekerja Sosial
3.	Client System	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua RW 06 Kelurahan Sukapura</li> <li>b) Seluruh RT di RW 06 Kelurahan Sukapura, Total ada 10 RT</li> <li>c) Seluruh Kepala Keluarga di RW 06 Kelurahan Sukapura, Total 648 KK</li> </ul>
4.	Support System	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pekerja Sosial</li> <li>b) Kelurahan Sukapura</li> <li>c) CSR. PT PINDAD</li> </ul>
5.	Contolling System	Kelurahan Sukaputa dan Ketua RW 06 Kelurahan Sukapura
6.	Implementing System	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pekerjaan Sosial</li> <li>b) Clien System yaitu Ketua RW 06 , seluruh RT, dan perwakilan KK di RW 06 Kelurahan sukapura</li> <li>c) Pemerintah Kelurahan Sukapura</li> <li>d) CSR.PT PINDAD</li> </ul>
7.	Target System	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua RW 06 Kelurahan Sukapura</li> <li>b) Seluruh RT di RW 06 Kelurahan Sukapura</li> <li>c) Seluruh masyarakat RW 06 Kelurahan Sukapura</li> </ul>
8.	Action System	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pekerjaan Sosial</li> <li>b) Clien System yaitu Ketua RW 06 , seluruh RT, dan perwakilan KK di RW 06 Kelurahan sukapura</li> </ul>

		c) Pemerintah Kelurahan Sukapura
--	--	----------------------------------

#### e. Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program “**Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**“, metode yang akan digunakan adalah community organization dan community development (CO/CD) yang merupakan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

##### 1. Persasi

Yaitu teknik yang digunakan untuk meyakinkan orang lain agar menerima dan dukungan pandangan – pandangan atau persepsinya mengenai suatu isu. Hal ini dilakukan agar para client system dapat menyadari bagaimana permasalahan penyimpangan pengelolaan dana tersebut sehingga hal ini dapat menuju perubahan perilaku client system.

##### 2. Penyuluhan

Yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada client system sasaran dengan tujuan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

##### 3. Capacity Buiding

Yaitu merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini kemampuan yang ditingkatkan yaitu kemampuan mengelola keuangan dana swadaya.

##### 4. Focus Group Discussion (FGD)

FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.

Strategi yang digunakan adalah strategi kampanye dan kolaborasi. Strategi kolaborasi dilakukan dengan meyakinkan sistem sasaran tentang pentingnya perubahan. Sedangkan strategi kampanye dapat dilakukan antara sistem sasaran dan sistem pelaksana perubahan. Dengan demikian sistem pelaksana perubahan masih mungkin untuk memberikan penjelasan dengan tujuan untuk meyakinkan sistem sasaran. Untuk taktik yang digunakan yaitu edukasi, persuasi, dan capacity building.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan**

Rencana intervensi yang ideal memerlukan rancangan anggaran yang baik serta mampu menutupi kebutuhan kegiatan intervensi. Untuk pelaksanaan kegiatan “**Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura** ” berikut rancangan anggaran yang sudah disusun.

**Table 2.10 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Sosialisasi Penguatan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**

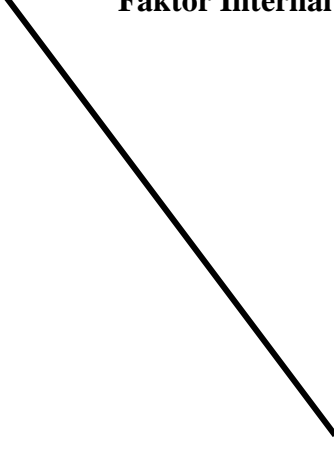
No.	Nama Item	Volume	Jenis Satuan	Harga @	Jumlah
1.	Print proposal	2	Buah	Rp.20.000	Rp. 40.000
2.	Print surat undangan	50	Buah	Rp. 150	Rp. 7.500
3.	Cetak banner	1x2.5	Meter	Rp.60.000	Rp.60.000
4.	ATK	1	Paket	Rp.35.000	Rp.35.000
5.	Honorarium narasumber	2	Orang	Rp. 0	Free
6.	Snack peserta	61	Paket	Rp.5.000	Rp.305.000
7.	Snack narasumber	2	Paket	Rp.20.000	Rp.40.000
8.	Makan siang narasumber	2	Buah	Rp.20.000	Rp.40.000
9.	Transpotasi narasumber	2	Orang	Rp.150.000	Rp.300.000
<b>TOTAL</b>					<b>Rp.557.500</b>

Bahan dan alat yang akan digunakan dalam kegiatan “Forum PBI Sukapura” yaitu sebagai berikut : (1) LCD Proyektor; (2) Layar Proyektor; (3) Laptop; (4) Buku; (5) Pulpen; (6) Meja; (7) Kursi; (8) Banner; (9) Wireless Speaker; (10) Microphone

**g. Analisis Kelayakan Program**

Analisis kelayakan program yang digunakan dalam Program “**Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**” yaitu analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu penilaian manajemen mengenai Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

**Table 2.11 Analisis SWOT Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**

<p><b>Faktor Internal</b></p> 	<p><b>S (strength)</b></p> <p>1. Program ini dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana swadaya masyarakat kepada client system</p> <p>2. Client System membutuhkan informasi terkait praket pembauatan rincian anggaran dana swadaya</p>	<p><b>W (weakness)</b></p> <p>Tidak semua kepala keluraga di RW 06 Kelurahan Sukapura menjadi peserta pada program ini</p>
<p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p><b>O (opportunity)</b></p> <p>Adanya dukungan dari, CSR.PT PINDAD terkait pengadaaan program ini</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>Berkoordinasi dengan PT.PINDAD , dan pemerintah kelurahan sukapura untuk dapat membantu penyampaian informasi mengenai pembuatan rincian anggaran dana swadaya</p>	<p><b>Strategi Wo</b></p> <p>Melakukan sosialisasi secara berkelompok atau dengan sistem shift</p>
<p><b>T (threat)</b></p> <p>Banyaknya kepala keluraga di RW 06 di keluarahan sukapura mendapatkan informasi terkait program ini dikarenakan jumlah KK di RW sebanyak 648 KK</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>Menyebarkan informasi singkat mengenai kegiatan via media sosial untuk menghindari kontak</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>Menerapkan sistem penyuluhan yang asik dan tidak membosankan</p>

Dari analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan kegiatan penguatan pengelolaan dana swadaya masyarakat layak dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada kekeuatan kegiatan ini yakni dapat memebrikan pemahaman mengenai teknik atau mekanisme membuat anggaran dana terkait dana swadaya masyarakat membutuhkan informasi atau edukasi mengenai pengelolaan dana swadaya masyarakat kelurahan sukapura.

Adapun indicator keberhasilan pada program,m ini yaitu;

1. Tidak terjadinya miskomunikasi antara warga, RT , dan RW dalam mengelolah dana swadaya masyarakat
2. Perincinan anggran dana swadaya masyarakat menjadi lebih jelas dan baik

3. Berkurangnya perselisihan terkait pengelolaan dana swadaya masyarakat

#### **h. Jadwal dan Langkah-Langkah**

Berikut jadwal dan langkah-langkah program kegiatan “**Sosialisasi Penguatan Pengelolaan Dana Swadaya Masyarakat Sukapura**” yang dicantumkan dalam tabel berikut:

**Table 2.12 Jadwal dan Langkah -langkah Sosialisasi Penguatan Pengeloaan Dana Swadaya Mayarakat Sukapura**

No.	Nama Kegiatan	Maret		April			
		Pelaksanaan Minggu Ke-					
		III	IV	I	II	III	IV
1.	Melakukan rapat mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan kerja sama dengan PT.PINDA dan Kelurahan Sukapura	V					
2.	Menyusun rencana kerja penyuluhan		V				
3.	Menyusun materi praktek penyuluhan sosial			V			
4.	Melakukan koordinasi dengan sistem sumber terkait (Pemerintah kelurahan sukapura dan PT.PINDAD)			V			
5.	Menyiapkan media dan sarana prasarana yang akan digunakan				V		
6.	Penyelenggaraan kegiatan forum diskusi					V	
7.	Pelaksanaan penyuluhan secara langsung					V	
8.	Evaluasi kegiatan						V

## C. Analisis Pemberdayaan

### 1. Gambaran Masalah

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kelurahan sukapura terdapat banyak pekerja informal yang bisa kerja apa saja jika halal, namun mereka terkendala hambatan yaitu mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengikuti keahlian yang dibutuhkan pada penyedia lapangan kerja.

Di kelurahan sukapura terdapat usaha Home Industri yaitu rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Terdapat home industry di kelurahan sukapura yang memproduksi barang/jasa jenis jilbab.

Rukun Warga (RW) 07, Kelurahan sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung terdapat kewirausahaan sosial home industry. Kewirausahaan sosial dapat memberikan daya kepada kelompok rentan guna meningkatnya kesejahteraan sosial hidup mereka, namun praktikan telah mendapatkan isu atau masalah terkait pemberdayaan sosial yaitu kebanyakan kewirausahaan di kelurahan sosial hanya mencari profil dan tidak ikut mengambil peran menaikan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kelurahan sukapura.



*Gambar 2.3 Proses Pembuatan Jilbab Home Industri di RW 07 Kelurahan Sukapura*

Namun home industry di kelurahan sukapura tersebut dari hasil assessment praktikan melalui wawancara telah didapatkan bahwa home indsturi memproduksi jilbab tersebut tidak membantu perekonomian dan pembangunan berkelanjutan

bagi masyarakat kelurahan sukapura. Ini dilihat dari merekrut karyawan tidak mengambil dari sumber daya manusia (SDM) di kelurahan sukapura.

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Pemberdayaan Sosial**

Menurut Rappaport dalam Edi Suharto pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Menurut Parson dalam buku Edi Suharto strategi pemberdayaan adalah proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas.

Beberapa contoh program dan kegiatan yang biasanya dilakukan dalam rangka pemberdayaan sosial antara lain:

- 1) Pelatihan dan pendidikan: Program pelatihan dan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial.
- 2) Pemberian modal usaha: Pemberian modal usaha atau kredit mikro adalah salah satu bentuk pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri.
- 3) Pemberian bantuan sosial: Pemberian bantuan sosial adalah bentuk pemberdayaan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk uang tunai, bantuan pangan, atau bantuan kesehatan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi adalah salah satu bentuk pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan sumber daya ekonomi.
- 4) Partisipasi masyarakat: Pemberdayaan sosial juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan sosial sangat penting dalam memperkuat kapasitas dan kemampuan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Dalam jangka panjang, pemberdayaan sosial diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## b. Home Industri

Home industri adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedang industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, home industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.

Pengertian usaha kecil juga secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar. Kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah Milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota, permohonan izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, home industri termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari home industri antara lain:

- 1) Modal usaha yang relatif rendah: Home industri dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil sehingga memungkinkan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha mereka sendiri. Fleksibilitas waktu dan lokasi: Home industri dapat dijalankan dengan waktu dan lokasi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok masyarakat yang menjalankannya.
- 2) Kemandirian ekonomi: Home industri memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok masyarakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Namun, home industri juga memiliki beberapa tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan, antara lain: Keterbatasan akses pasar: Home industri seringkali menghadapi kendala dalam memasarkan produk mereka karena keterbatasan akses pasar dan kurangnya kemampuan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Kualitas produk yang tidak terjamin: Kualitas produk yang dihasilkan oleh home industri mungkin tidak dijamin karena keterbatasan sumber daya dan keterampilan teknis. Dampak lingkungan dan kesehatan: Home industri dapat menyebabkan

dampak lingkungan dan kesehatan yang negatif karena penggunaan bahan kimia dan limbah yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan home industri sebagai sektor ekonomi yang potensial dan berkelanjutan. Dukungan ini dapat berupa pelatihan dan pendampingan, akses ke pasar yang lebih luas, serta pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan dan kesehatan dari home industri.

#### c. UMKM

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari UMKM antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat: UMKM dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja: UMKM dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan membantu mengurangi tingkat pengangguran.
- 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi: UMKM memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok masyarakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

#### d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Praktek manajemen sumber daya manusia membantu memperbaiki produktivitas secara langsung dan secara tidak langsung dapat memperbaiki kualitas kerja karyawan. Aktivitas sumber daya manusia adalah tindakan yang

diambil untuk memperoleh dan memelihara karyawan yang sesuai dengan organisasi (Sedarmayanti, 2009).

Beberapa keuntungan memiliki SDM yang baik dan berkualitas antara lain:

- 1) Meningkatkan produktivitas dan kinerja: SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, sehingga memperkuat posisi perusahaan di pasar dan meningkatkan keuntungan.
- 2) Mengurangi biaya: SDM yang berkualitas dapat mengurangi biaya perusahaan, karena mereka mampu bekerja secara efektif dan efisien, sehingga mengurangi waktu dan biaya produksi.
- 3) Meningkatkan inovasi dan kreativitas: SDM yang berkualitas dapat menciptakan inovasi dan ide-ide baru untuk perusahaan, sehingga memperkuat posisi perusahaan di pasar dan meningkatkan daya saing.

Namun, memiliki SDM yang baik dan berkualitas juga memiliki beberapa tantangan dan risiko, antara lain:

- 1) Persaingan yang ketat: Persaingan di pasar dapat membuat perusahaan kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan SDM yang berkualitas.
- 2) Perubahan teknologi: Perubahan teknologi yang cepat dapat membuat perusahaan kesulitan dalam mempertahankan keahlian dan keterampilan SDM yang berkualitas.
- 3) Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya dapat membuat perusahaan kesulitan dalam memberikan pelatihan dan pengembangan SDM yang berkualitas.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi yang baik untuk mengelola SDM yang berkualitas agar dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan, memberikan insentif dan kesejahteraan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

### **3. Assesmen**

#### **a. Identifikasi Masalah**

Home industry jilbab tersebut di kelurahan sukapura tersebut bertepatan pada RW 07, praktikan melakukan home visit dengan teknik wawancara untuk mengetahui lebih detail mengenai home industry jilbab tersebut. Dari hasil wawancara dari pemilik home industry jilbab tersebut terlah didapatkan informasi bahwa pemilik tidak menggunakan Sumber daya Manusia (SDM) yang ber-KTP di kelurahan sukapura.

Home indsurtly yang memproduksi jilbab tersebut banyak tidak mempromosikan produknya di lingkungan kelurahan sukapura dan lebih memilih menggunakan aplikasi jual bali karena dinilai lebih cepat dan mudah, kemudian

untuk marketing atau promosi produk hanya dilakukan oleh kerabat – kerabat terdekat pemilik usaha jilbab tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa home industry jilbab tersebut yang dimana sebagai produk local di kelurahan sukapura tidak dikenali padahal bisa menjadi produk local yang banyak disukai dari luar daerah.

Untuk melakukan analisis serta identifikasi masalah, praktikan menggunakan teknik wawancara ketika melakukan home visit tempat home industry jilbab di Kelurahan sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Dalam identifikasi masalah yang dilakukan yaitu :

1. Wawancara pihak kelurahan untuk mengetahui home industry di kelurahan sukapura
2. Wawancara pemilik UMKM atau home industry Jilbab Ibu Martha di RW 07



*Gambar 2.4 Dokumentasi Wawancara pemilik Home Industri Jilbab di RW 07 Kelurahan Sukapura*

**Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait analisis pemberdayaan sosial adalah sebagai berikut :**

1. Belum menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) local kelurahan sukapura

Berdasarkan pernyataan dari pemilik home industry jilbab tersebut di kelurahan sukapura pada wawancara dari hasil wawancara telah didapatkan bahwa pemilik usaha memilih karyawan dari luar dikarenakan warga kelurahan sukapura belum memiliki keahlian yang dibutuhkan seperti keahlian menjahit.

2. Tidak membrand produk lokal

Berdasarkan penuturan pemilik home industry jilbab tersebut mengatakan bahwa lebih mudah menjualkan produknya di aplikasi jual beli karena dinilai lebih cepan dan mudah, tetapi hal ini menyebabkan bahwa produk local kelurahan sukapura tersebut banyak diminati pihak luar tanpa banyak diketahui oleh masyarakat kelurahan sukapura sendiri.

3. Pemberdayaan sesuai keahlian dibutuhkan

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemilik usaha home industri pada didapatkan informasi bahwa alasan pemilik tidak memakai sumber daya manusia dari kelurahan sukapura karena dinilai belumlah banyak memiliki keahlian yang dibutuhkan seperti menjahit.

**Berdasarkan hasil assessment tersebut, maka dapat diketahui bahwa:**

1. Penyebab masalah

Penyebab permasalahan yang ada yaitu kurangnya dilakukan pemberdayaan sesuai keahlian yang banyak dibutuhkan sehingga warga kelurahan sukapura tidak bisa bersaing dengan pekerja lainnya (poin 3). Sehingga pemilik home industri lebih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh perusahaan rumahnya (1), ditambah lagi pemilik usaha tidak banyak mempromosikan produknya di area kelurahan sukapura sehingga produk lokal tersebut banyak yang tidak mengetahuinya.

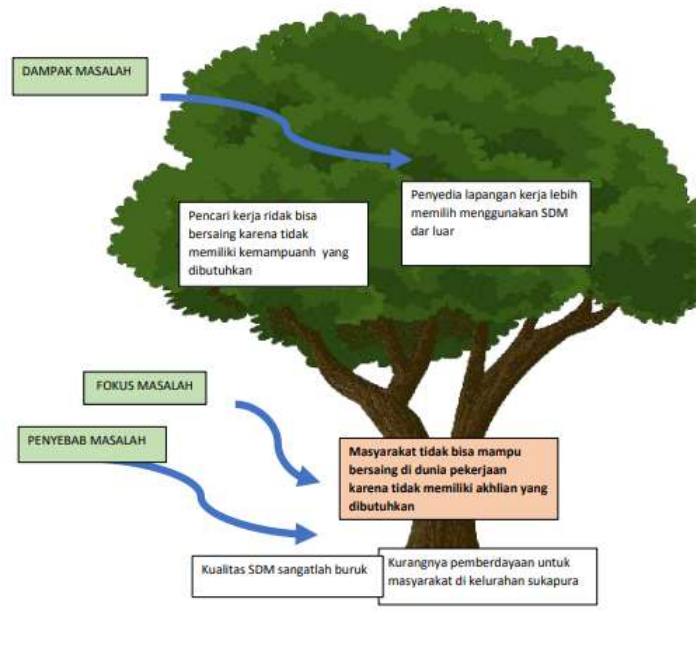
2. Dampak masalah

Jika dilihat dari penyebab utama permasalahan tersebut adalah kurangnya pemberdayaan di kelurahan sukapura sehingga warga tidak mampu bersaing dengan pekerjaan yang dibutuhkan

3. Fokus masalah

Jika dilihat penyebab utama pada permasalahan tersebut adalah kurangnya dilakukan peningkatan daya atau pemberdayaan kepada masyarakat kelurahan sukapura sehingga mereka kurang bisa bersaing di dunia pekerjaan.

Adapun fokus masalah terkait melalui tools analisis pohon masalah:



Gambar 2.5 Pohon Masalah Isu Pemberdayaan Sosial

**KETERANGAN :**

Dari pohon masalah di atas, dapat melihat bahwa inti masalah pada penelusuran yang telah dilakukan praktikan di kelurahan sukapura yakni masyarakat tidak bisa mampu bersaing di dunia pekerjaan karena tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Menurut pemiliki home industry di kelurahan sukapura mengapa ia tidak merekrut karyawan di kelurahan sukapura karena ia meilai bahwa sumber daya manusia (SDM) di kelurahan sukapura belum memiliki keahlian yang ia butuhkan seperti keahlian menjahit.

Pada penyebab masalah dijelaskan bahwa kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di kelurahan sukapura sehingga dampak masalahnya yakni pencari kerja tidak bisa bersaing dikarenakan tidak memilkinkahlian yang dibutuhkan. Selainnya itu juga kurangnya intervensi peningkatan keterampilan kepada SDM di kelurahan sukapura menyebabkan dampak masalah yakni masyarakat tidak memilki keahlian yang dibutuhkan.

Jika permasalahan ini terus tidak ditindaklanjuti, maka pegangguan di kelurahan sukapura akan terus meningkat, padahal jika dilihat dari pengusaha UMKM di kelurahan sukapura mereka juga sebagai penyedia lapangan kerja membutuhkan pekerja dari mana saja, tetapi dikarenakan SDM di kelurahan sukapura tidak

memiliki keahlian yang mereka butuhkan menyebabkan mereka terpaksa untuk merekrut karyawan dari luar kelurahan sukapura.

#### **b. Identifikasi Kebutuhan**

##### **1. Sistem sumber informal**

Sistem sumber informal yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah berupa peran teman, tetangga, dan keluarga dalam memberikan semangat kepada para pencari kerja yang belum memiliki keahlian di kelurahan sukapura, serta pemilik home industry di kelurahan sukapura.

##### **2. Sistem sumber formal**

Sistem sumber formal yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

##### **3. Sistem sumber kemasyarakatan**

Sumber kemasyarakatan yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa provinsi jawa barat

#### **c. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial**

Adapun potensi yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah adalah memanfaatkan program peningkatan daya dari Lembaga pemerintahan seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi jawa barat yang sering melakukan kegiatan pemberdayaan manusia. Kemudian bekerja sama dengan pemilik usaha Home industry membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan. Sistem sumber formal sebagai wadah pemberdayaan tersebut yakni Lembaga swdaya masyarakat (LSM).

### **4. Rencana Intervensi**

#### **a. Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu paradigma baru pembangunan, seperti adanya kecenderungan berfikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari pada dimensi moral, dimensi ekonomi lebih penting dari pada dimensi sosial. Seperti ini akan mengakibatkan semakin ketinggalannya lapisan masyarakat bawah, adanya anggapan bahwa lembagalembaga yang ada dimasyarakat kurang efisien dan menghambat proses pembangunan.

Jika dilihat dari permasalahan yang praktikan temukan dari kelurahan sekapura yakni terdapat banyaknya home industry yang banyak menggunakan jasa penjahit tetapi Sumber daya manusia (SDM) di kelurahan sukapura banyak yang tidak memmiliki keahlian menjahit, padahal jika dilihat banyaknya persediaan lapangan pekerja yang membutuhkan jasa menjahit.

Menjahit adalah melekatkan (melepit, mengelim, menyambung) dengan jarum dan benang baik dengan mesin jahit atau dengan tangan, atau proses pembuatan

busana mulai dari mengukur, membuat pola, merancang bahan, memotong, memindahkan garis pola, menyambung dan penyelesaian. Suatu keterampilan yang jika kita menguasainya akan menghasilkan banyak manfaat, selain bisa membuat pakaian untuk diri sendiri juga membuat pakaian untuk orang lain, yang kemudian dijadikannya sebagai bentuk usaha mandiri, mudah untuk dipasarkan hasilnya karena pakaian salah satu kebutuhan pokok bagi setiap orang.

#### **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Tujuan umum dari adanya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Sukapura ke berbagai sistem sumber yang potensial sehingga dapat memajukan lini usaha kedepannya. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) pada pemberdayaan masyarakat melalui menjahit secara efektif di kelurahan sukapura
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia (SDM) di dunia pekerjaan
- 3) Pemilik usaha home industry memanfaatkan Sumber daya manusia (SDM ) yang ada di kelurahan sukapura

#### **c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Program kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap masalah belum optimalnya program BUMDes siap mandiri di Desa Lembang ini berjudul “**SUPEJA (Sukapura Pemberdayaan Menjahit)**”. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan dalam bidang keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat setempat melalui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap masyarakat dalam keahlian menjahit.

Pelatihan sebagai sistem tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur pokok yaitu unsur masukan, unsur proses dan unsur hasil. Selain itu, proses pembelajaran pelatihan dipengaruhi oleh instrumental input maupun environment input. Instrumental input proses pelatihan terdiri dari sumber daya manusia, kurikulum/materi, sarana prasarana, metode, serta evaluasi di mana untuk dapat menghasilkan mutu lulusan yang bermutu maka komponen utama dalam instrumental input proses pelatihan tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik pula. Agar pelaksanaan program pelatihan menjahit mencapai sasaran seperti yang diharapkan program pelatihan menjahit harus merumuskan lima instrumental input proses pelatihan yang terdiri atas, antara lain:

- 1) Para Pelatih atau Instruktur

Para (instruktur) yang dipilih adalah yang sudah berpengalaman dan memiliki keterampilan dalam memberikan keterampilan, dalam arti kata para pelatih mampu menggunakan metode yang ada dan menguasai materi pelatihan dengan baik, serta mampu menjaga situasi pelatihan agar tetap dalam keadaan yang menunjang pencapaian tujuan pelatihan.

## 2) Materi Pelatihan

Materi pelatihan, sesuai dengan tujuan pelatihan, bahan bacaan disusun dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti dan dicerna oleh peserta pelatihan. Bahan latihan disiapkan secara tertulis agar mudah dipelajari oleh peserta. Penulisan bahan dalam bentuk buku paket materi pelatihan hendaknya memperhatikan faktor-faktor tujuan pelatihan, tingkatan pelatihan, harapan lembaga penyelenggara pelatihan, dan lamanya pelatihan.

## 3) Sarana Prasarana

Media dalam pelatihan dapat berupa grafik atau video visual, alat-alat belajar atau instrumen yang mendukung suatu kegiatan pelatihan atau pembelajaran. Fungsi dari media dalam proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan, mendukung, atau mengarahkan perhatian para peserta didik tentang pengetahuan dan keterampilan terhadap pelajaran yang disajikan, dan jenis media yaitu media audio, dan media cetak.

### d. Sistem Partisipan

Adapun sasaran program dalam pelaksanaan “**SUPEJA (Sukapura Pemberdayaan Penjahit)**” yang akan dilaksanakan di kelurahan sukapura, kecamatan kiaracondong, kota bandung yaitu :

*Table 2.13 Sistem Partisipan Program Penyuluhan SUPEJA*

No.	JENIS SISTEM	SISTEM REPRESENTATIF
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change agent system	Pekerja Sosial
3.	Client System	Masyarakat yang tidak memiliki keahlian
4.	Support System	a) Pemerintah kelurahan sukapura b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) c) Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Jawa Barat d) Pemilik usaha Home Industry
5.	Controlling System	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
6.	Implementing System	a) Pekerja sosial b) Masyarakat yang tidak memiliki keahlian di kelurahan sukapura c) Pemerintah kelurahan sukapura d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

		e) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat
7.	Target System	Masyarakat kelurahan sukapura yang tidak memiliki pekerjaan dan keahlian
8.	Action System	a) Pekerja Sosial b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

#### e. Metode dan Teknik

Metode pelatihan dipilih yang paling cocok untuk menyampaikan materi kepada para peserta pelatihan oleh tim pelatih yang bersangkutan, penggunaan metode yang cocok akan mempermudah peserta latihan menerima materi yang diberikan, dengan demikian perubahan yang diharapkan dapat mencapai sesuai dengan tujuan pelatihan dan harapan peserta latihan.

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan program “SUPEJA (Sukapura Pemberdayaan Menjahit)” yaitu dengan menggunakan Community Orgsnization/Community Development (CO/CD). Community Organization (Pengorganisasian Masyarakat) yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Kemudian, Community Development (Pengembangan Masyarakat) yaitu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada dengan melibatkan partisipasi partisipasi masyarakat serta elemen penting lainnya. Metode ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat pada keahlian menjahit agar kedepannya mampu bersaing pada dunia pekerjaan.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial adalah memberikan penerangan/penjelasan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan ini diberikan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan para masayarakat yang belum memiliki keahlian, Agar proyek Penyuluhan dan peningkatan keterampilan menjahit berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan maka dilakukan beberapa kegiatan persiapan sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pertemuan dengan semua, anggota tim pelaksanaan teruntuk membicarakan dan merenungkan langkah – langkah yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan proyek yang meliputi penetapan jadwal. Menentukan materi penyuluhan, pembagian tugas termasuk penyediaan bahan – bahan yang diperlukan serta tugas pelaksanaan selanjutnya.

- 2) Melakukan pendekatan, khususnya kepada pemilik home industry dan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, untuk mencari kesempatan tentang waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta serta kriteria penetapan peserta. Dalam pendekatan ini dijelaskan pula secara rinci tentang maksud pengandaan kegiatan ini, manfaat yang akan diperoleh, target yang akan dicapai dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan**

Rencana intervensi yang ideal memerlukan rancangan anggaran yang baik serta mampu menutupi kebutuhan kegiatan intervensi. Untuk pelaksanaan kegiatan “SUPEJA (Sukapura Pemberdayaan Menjahit)” berikut rancangan anggaran yang sudah disusun.

**Table 2.14 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyuluhan Mejahit di Kelurahan Sukapura**

No.	Nama Item	Volume	Jenis Satuan	Harga @	Jumlah
1.	Print proposal	2	Buah	Rp.20.000	Rp. 40.000
2.	Print surat undangan	50	Buah	Rp. 150	Rp. 7.500
3.	Cetak banner	1x2.5	Meter	Rp.60.000	Rp.60.000
4.	ATK	1	Paket	Rp.35.000	Rp.35.000
5.	Tenaga Pekerja & Instruktur	2	Orang	Rp.900.000	Rp.1.800.000
6.	Snack peserta	50	Paket	Rp.5.000	Rp.250.000
7.	Snack narasumber	2	Paket	Rp.20.000	Rp.40.000
8.	Makan siang narasumber	2	Buah	Rp.20.000	Rp.40.000
9.	Transpotasi narasumber	2	Orang	Rp.150.000	Rp.300.00
	Sewa mesin penjahit beserta bahannya	4	1 Set	Rp.75.000	Rp.300.000
<b>TOTAL</b>					<b>Rp.2.872.00</b>

Bahan dan alat yang akan digunakan dalam kegiatan “SUPEJA (Sukapura Pemberdayaan Menjahit)” yaitu sebagai berikut : (1) LCD Proyektor; (2) Layar Proyektor; (3) Laptop; (4) jarum jahit; (5) benang ; (6) Meja; (7) Kursi; (8) Banner; (9) Wireless Speaker; (10) Microphone, (11) Mesin jahit, (12) Bahan kain.

**g. Analisis Kelayakan Program**

Analisis kelayakan program yang digunakan dalam Program “**SUPEJA (Sukapura Pemberdayaan Menjahit)**” yaitu analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu penilaian manajemen mengenai Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

**Table 2.15 Analisis SWOT Kegiatan Penyuluhan SUPEJA**

<b>Faktor Internal</b>	<b>S (strength)</b> 1. Program ini dapat memberikan pemahaman masyarakat terkait teknis menjahit 2. Masyarakat lebih mudah memahami bagaimana cara menjahit karena langsung dipraktikkan	<b>W (weakness)</b> Tidak semua peserta dapat mudah dengan cepat memahami dalam menjahit
<b>Faktor Eksternal</b>		
<b>O (opportunity)</b> Adanya dukungan dari, Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi jawa barat.	<b>Strategi SO</b> Berkoordinasi dengan Lembaga dwadaya masyarakat (LSM) dan pemilik home industry di kelurahan sukapura	<b>Strategi Wo</b> Melakukan kegiatan secara rutin yang akan dilakukan 2 minggu sekali.
<b>T (threat)</b> Tidak semua peserta dapat gampang memahami mekanisme menjahit secara langsung	<b>Strategi ST</b> Menyebarkan informasi dalam bentuk video agar peserta dapat belajar dimana saja	<b>Strategi WT</b> Menerapkan prinsip disiplin agar peserta dapat mengikuti kegiatan secara rutin

Dari analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan kegiatan peemberdayaan menjahit di kelurahan sukapura layak dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada kekuatan kegiatan ini yang sesuai dibutuhkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kelurahan sukapura yang banyak membutuhkan jasa penjahit dikarenakan banyak konveksi atau home industry dengan memproduksi baju, jilbab, dll.

Adapun indicator keberhasilan pada progam ini yaitu ;

1. Sumber daya manusia di kelurahan sukapura menjadi berkualitas
2. Sumber daya manusia di kelurahan sukapura mampu bersaing di dunia pekerjaan
3. Home industry di kelurahan sukapura dapat dikatakan kewirausahaan sosial

#### **h. Jadwal dan Langkah-Langkah**

Berikut jadwal dan langkah-langkah program kegiatan “SUPEJA (Sukapura Pemberdayaan Menjahit)” yang dicantumkan dalam tabel berikut:

**Table 2.17 Jadwal dan Langkah – langkah Kegiatan Penyuluhan SUPEJA**

No.	Nama Kegiatan	Maret		April			
		Pelaksanaan Minggu Ke-					
		III	IV	I	II	III	IV
1.	Melakukan prakondisi penyuluhan dengan menentukan masalah, kebutuhan, dan prioritas masalah	V					
2.	Menyusun rencana kerja penyuluhan dan materi penyuluhan sosial		V				
3.	Melakuakn praktik menjahit 2 minggu sekali			V	V	V	V
4.	Melakukan koordinasi Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan pemilik home indstry			V			
5.	Menyiapkan media dan sarana prasarana yang akan digunakan				V		
6.	Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi			V			
7.	Pelaksanaan penyuluhan secara langsung			V			
8.	Evaluasi kegiatan						V

## **D. Analis Penataan Lingkungan**

### **1. Gambaran Masalah**

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi: 1). Sampah organik/basah, contoh : sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah – rempah atau sisa buah dan lain – lain yang dapat mengalami pembusukan secara alami. (2) sampah anorganik.kering, Contph : logam, besi, kaleng, plastic, kaert, boto, dan lain – lainyang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. 3) Sampah berbahaya, Contoh : Baterai, boto racun nyamuk, jarum suntik bekas dan lain – lain.

Pembuanagn sampah yang tidak diurus dengagan baik, akan mengakibatkan masalah besar. Karena penumpukan ranah yang juga akan berdampak ke saluram air tanah. Demikian ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbantnya saluran air dan banjir (Sicular 1989).

Gerakan pemungutan sampah merupakan program untuk mengubah kultur masyarakat untuk lebih mencintai kelurahan sukapura. “Perubahan kultur dari yang biasanya cuek, biasanya buang sampah sembarangan, kultur yang biasa pasif menjadi aktif untuk mencintai kebersihan.Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) merupakan aksi yang memberikan keteladanan, motivasi kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas sampah, membentuk masyrakat agar menjaga lingkungan bebas sampah, dan manajeen praktik dalam pemilahan sampah organic dan non organi. Namun dalam merealisasikan kegiatan tersebut terdapat kendala yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan GPS (Gerakan Pemungutan Sampah).



*Gambar 2.6 Proses Kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) Berlangsung*



*Gambar 2.7 Selesaiya Kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS)*

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Kajian tentang Lingkungan**

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotic). Diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.

Beberapa tantangan dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

1. Pencemaran lingkungan: Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti limbah industri, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya dapat merusak lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati.
2. Perubahan iklim: Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca dapat menyebabkan dampak yang serius pada lingkungan dan kehidupan manusia di seluruh dunia.

3. Kerusakan habitat: Kerusakan habitat yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengurangi emisi gas rumah kaca: Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil, meningkatkan efisiensi energi, dan menggunakan energi terbarukan.
2. Menerapkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle, yaitu mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang bahan yang digunakan untuk mengurangi limbah dan meminimalkan dampak pencemaran lingkungan.
3. Melestarikan hutan dan lahan: Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi deforestasi, mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan, dan mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan teknologi bersih: Teknologi bersih dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan, seperti teknologi kendaraan listrik dan teknologi pengolahan limbah yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

#### b. Kajian tentang Sampah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006).

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, merupakan hasil aktifitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah bias berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, paar dan sebagainya (Sejati, 2009) .

Beberapa masalah yang terkait dengan sampah antara lain:

1. Peningkatan jumlah sampah: Peningkatan jumlah sampah disebabkan oleh konsumsi yang tinggi dan kurangnya pengelolaan yang baik.
2. Pencemaran lingkungan: Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari udara, air, dan tanah. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem dan mengancam kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati.
3. Masalah kesehatan: Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit, seperti tikus, lalat, nyamuk, dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit.

### 3. Assesmen

#### a. Identifikasi Masalah

Sebelum menentukan prioritas masalah, praktikan melakukan analisis untuk mengetahui apa saja permasalahan tentang penataan lingkungan di kelurahan sukapura dengan melakukan Methodology Participatory Assessment (MPA) yaitu pendekatan kepada masyarakat untuk menemukan dan menggali masalah, kebutuhan dan kekuatan masyarakat secara partisipasi. Dalam identifikasi masalah pada tema penataan lingkungan yang dilakukan melalui yaitu Dari hasil diskusi pada proses Methodology Participatory Assessment (MPA) tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait analisi penataan lingkungan sosial adalah sebagai berikut : (1) Banyak warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) RW 10, (2) Lingkungan masyarakat yang kotor di RT 02, (3) Parkir mobil dilapangan volley mengganggu kegiatan warga, (4) Sampah dilapangan volley menimbulkan bau tidak sedap. (5) banyak pedagang kaki lima punya motor menyatu di satu lingkungan lapangan futsal RW 05, (6) banyak pedagang kaki lima disepanjang jalan sehingga menghalangi jalan RW 13, (7) sebagian rumahnya tidak punya septic tank RW 10, (8) air keruh di RW 10.

Dari masalah tersebut praktikan berfokus dimasalah “Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS), untuk dapat mendapatkan informasi lebih dalam pada masalah tersebut praktikan melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat. Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait penataan lingkungan sosial adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS)

Berdasarkan wawancara dengan ibu – ibu kader RW 10 bahwa mengapa masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) dikarenakan berbagai alasan seperti ketika kegiatan itu terlaksana terkendala bahwa mereka sedang bekerja, sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan

2. Belum adanya sanksi atau hukuman jika warga tidak mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu , praktikan mendapatkan informasi bahwa belum adanya hukuman jika warga tidak mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) tetapi hanya memberikan hadiah kepada warga yang aktif mengikuti kegiatan.

3. Pemberian reward atau hadiah kepada warga yang rajin mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu, praktikan mendapatkan informasi bahwa terdapat hadiah atau reward kepada warga yang rajin mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) agar masyarakat lebih rajin mengikuti kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil assessment tersebut, maka dapat diketahui :

#### 1. Penyebab Masalah

Penyebab masalah dari assessment yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) di kelurahan sukapura (Poin 1), pemberian reward dinilai tidak efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (poin 3), belum adanya sanksi atau hukuman jika warga tidak mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS).

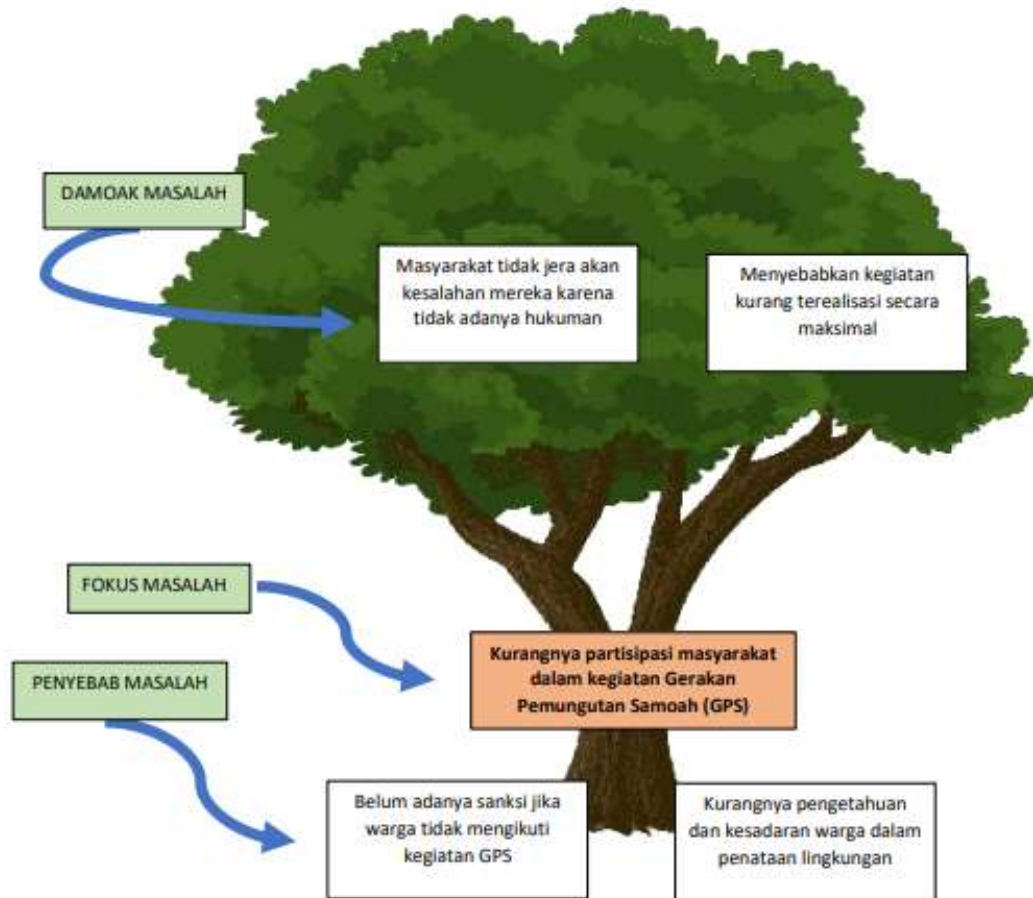
#### 2. Dampak Masalah

Dampak masalah dari hasil assessment yaitu mengakibatkan kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) terealisasi kurang optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat di kelurahan sukapura (poin 1), tidak adanya hukuman membuat warga yang sering tidak mengikuti kegiatan tetap melakukan kesalahan tanpa adanya efek jera (Poin 2), pemberian reward atau hadiah dinilai tidak efektif untuk menambah partisipasi masyarakat dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS).

#### 3. Fokus Masalah

Setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak serta observasi lapangan yang dilakukan dalam proses assessment dengan mempertimbangkan penyebab utama yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) serta dampak utamanya yaitu mengakibatkan proses kegiatan kurang terealisasi dengan optimal sehingga kegiatan di lingkup permukiman yang bertujuan membangun lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras dan lestari kurang tertata.

Adapun fokus masalah yang dikaji tools analisis pohon masalah :



Gambar 2.8 Pohon Masalah Isu Pemberdayaan Manusia

#### KETERANGAN :

Dalam pohon masalah di atas, dapat diartikan bahwa inti masalah pada penelusuran yang telah dilakukan praktikan di kelurahan sukapura yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS). Terdapat 2 penyebab terjadinya kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) kurang kontribusi masyarakat kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih dan belum adanya sanksi pada warga yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga menyebabkan dampak masalah kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) kurang teralisasi dengan menyeluruh dikarenakan kurangnya partisipan masyarakat.

#### b. Identifikasi Kebutuhan

Potensi masalah yang dapat ditimbulkan jika kurangnya partisipan masyarakat terhadap kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS). Menurut Blum, lingkungan merupakan factor yang paling berpengaruh terhadap derajat kesehatan mereka. Faktor perikau, akses terhadap pelayanan kesehatan dan genetic

merupakan factor lain yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2007:107). Factor tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam menciptakan kondisi yang sehat melainkan saling berkaitan satu sama lain.

Kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) merupakan kegiatan yang dapat mengurangi terjadinya masalah – masalah lingkungan, dengan adanya kegiatan ini maka lingkungan daerah kelurahan sukapura dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit dan polusi akan adanya sampah.

Berdasarkan analissi sebab dan akibat masalah di atas, maka kebutuhan yang diperlukan antara lain :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan
2. Pemberian pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengoptimalkan suatu kegiatan
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ancaman masalah pencemaran sampah
4. Peningkatan dalam mengelola suatu kegiatan dengan adanya sanksi.

### **c. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial**

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan dukungan pihak-pihak terkait yang dapat diakses dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

#### **1. Sistem sumber informal**

Sistem sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam pemecahan masalah ini yaitu dukungan dari pihak anggota keluarga ketika tidak bisa mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) bisa diwakilkan dengan anggota keluarga lainnya.

#### **2. Sistem sumber formal**

Sistem sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam pemecahan masalah ini yaitu ketua RW dan ketua RT di kelurahan sukapura.

#### **3. Sistem sumber kemasyarakatan**

Sistem sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam pemecahan masalah ini yaitu anggota PKK.

#### **4. Rencana Intervensi**

##### **a. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil assessment yang praktikan lakukan bahwa di kelurahan sukapura, terdapat permasalahan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat di kelurahan sukapura dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS). Penyebab utama masalah ini yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pentaan lingkungan yang menyebabkan dampak masalah kegiatan gerakan pemungutan sampah (GPS) tersebut menjadi kurang teralisasi secara maksimal karena kurangnya partisipasi. Terlebih di tambah dengan penyebab lainnya adalah belum adanya sanksi kepada warga yang tidak mengikuti kegiatan gerakan pemungutan sampah (GPS) sehingga menyebabkan dampak masalah yakni mereka tidak jera dengan kesalahan yang mereka lakukan.

Permasalahan terkait dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) menjadi isu yang kurang diperhatikan di kelurahan sukapura. Padahal, permasalahan ini bisa mengakibatkan berbagai hal yang merugikan masyarakat seperti kegiatan pemungutan sampah dikerjakan secara tidak menyeluruh, lingkungan yang dibersihkan hanya sebagian saja, lingkungan akan terlihat kumuh, serta mengakibatkan adanya bibit penyakit karena sampah – sampah ini masih berada di lingkup permukaan warga dan warga terbiasa untuk tak acuh kepada sampah sehingga hal ini menjadi urgensi dan harus diatasi secara maksimal agar kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) dapat berjalan secara menyeluruh.

Masih banyak masyarakat yang cenderung tak acuh dan mengelolah sampah sembarangan. Terlebih lagi, di kelurahan sukapura dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) belum memiliki sanksi atau hukuman kepada warga yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Hanya terdapat reward atau hadiah kepada warga yang rajin mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) sehingga warga yang tidak berkontribusi tetap terabaikan tanpa adanya tindakan lain agar masyarakat sadar pentingnya berkontribusi terhadap kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS).

Maka dari itu, dibutuhkan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait menjaga lingkungan agar lebih sehat dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada yaitu sistem sumber informal berupa dukungan dari keluarga dan tetangga yang bisa mewakili keluarga mereka yang tidak mengikuti kegiatan, sistem sumber formal berupa ketua RW dan ketua RT serta sistem sumber kemasyarakatan ibu – ibu dari PKK. Dengan kegiatan pembentukan karakter Sulisa (Sukapura Peduli Sampah), penyuluhan peningkatan wawasan masyarakat terkait kegiatan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, penyediaan tempat sampah di setiap sudut RT.

#### **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Adapun tujuan umum yang akan diperoleh yaitu :

1. Menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah
2. Mewudjukan pengelolaan sampah untuk mengurangi adanya sampah

Tujuan khusus yang akan diperoleh yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS)
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan urgensi permasalahan sampah

#### **c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Nama program ini yaitu “**SULISA (Sukapura Peduli Sampah)**”. Program ini dilakukan dengan membentuk karakter masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pemberantasan sampah. Panitia pada program ini akan melakukan suatu penyuluhan berserta pelatihan – peltihan cara mengelolah sampah dengan baik di kelurahan sukapura. Praktikan merumuskan suatu kegiatan yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan pelatihan cara mengelolah sampah dengan baik dan benar.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat di RW 10 di kelurahan sukapura tentang pentingnya kegiatan dalam pemungutan sampah. Kegiatan ini berupa penyuluhan dengan mendatangkan darasumber dari instansii pemerintah terkait yang membidangi penataan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini juga diringi dengan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) pemantauan langsung ini dilakukan dengan harapan masyarakat dapat lebih rajin lagi dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai warga kelurahan sukapura dengan rutin mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah. Harapanya, setelah dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi ini, masyarkat sebelumnya enggan mengikuti kegiatan GPS sadar akan pentingnya kegiatan tersebut untuk menjaga lingkungan.

#### **d. Sistem Partisipan**

Adapun sasaran program dalam pelaksanaan “**SULISA (Sukapura Peduli Sampah)**” yang akan dilaksanakan di kelurahan sukapura, kecamatan kiaracandong, kota bandung yaitu :

**Table 2.18 Sistem Partisipan Kegiatan SULISA**

No.	JENIS KEGIATAN	SISTEM REPRESENTATIF
1.	Initiator system	Pekerja sosial
2.	Change agent system	Pekerja sosial
3.	Client System	Masyarakat RW 10 Kelurahan sukapura
4.	Support System	a) Pemerintah Kelurahan Sukapura b) PKK c) Dinas kesehatan kota bandung
5.	Controlling System	a) Dinas kesehatan kota bandung b) Pekerja sosial
6.	Implementing System	a) Pekerja sosial b) Dinas kesehatan kota bandung c) Pemerintah kelurahan sukapura
7.	Target System	Masyarakat RW 10 Kelurahan Sukapura
8.	Action System	Pekerja sosial

**e. Metode dan Teknik**

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program “**SULISA (Sukapura Peduli Sampah)**” yaitu CO/CD. Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat. PBB (1955) mendefinisikan “Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”

Teknik yang digunakan yaitu :

1. Penyuluhan

Penyuluhan yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya. Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk

menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan**

Rencana intervensi yang ideal memerlukan rancangan anggaran yang baik serta mampu menutupi semua kebutuhan kegiatan intervensi. Untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan “**SALISA (Sukapura Peduli Sampah)**” berikut rancangan anggaran yang sudah disusun.

**Table 2.19 Rencana Anggaran Kegiatan SULISA**

No.	Nama Item	Volume	Jenis Satuan	Harga @	Jumlah
1.	Print proposal	2	Buah	Rp.20.000	Rp. 40.000
2.	Print surat undangan	40	Buah	Rp. 150	Rp. 7.500
3.	Cetak banner	1x2.5	Meter	Rp.60.000	Rp.60.000
4.	ATK	1	Paket	Rp.35.000	Rp.35.000
5.	Honoratium narasumber	2	Orang	Rp.900.000	Rp.1.800.000
6.	Snack peserta	50	Paket	Rp.5.000	Rp.250.000
7.	Snack narasumber	2	Paket	Rp.20.000	Rp.40.000
8.	Makan siang narasumber	2	Buah	Rp.20.000	Rp.40.000
9.	Transpotasi narasumber	1	Orang	Rp.150.000	Rp.150.00
<b>TOTAL</b>					<b>Rp.2.371.00</b>

Bahan dan Alat yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut : (1) LCD Proyektor; (2) Layar Proyektor; (3) Laptop; (4) Buku; (5) Pulpen; (6) Meja; (7) Kursi; (8) Banner; (9) Wireless Speaker; (10) Microphone

**g. Analisis Kelayakan Program**

Analisis kelayakan program dilakukan untuk menilai seberapa mampu program yang dicanangkan dapat memecahkan masalah yang ada. Dalam hal ini metode analisis kelayakan yang digunakan dalam Program “**SULISA (Sukapura Peduli Sampah)**” yaitu analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu penilaian manajemen mengenai Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

**Table 2.20 Analisis SWOT Kegiatan Program SULISA**

<p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>	<p><b>S (strength)</b>                  1. Program ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya limbah rumah tangga jika tidak dikelola dan langsung dialirkan ke selokan.                  2. Ibu – ibu kader memerlukan bantuan untuk mengawasi masyarakat dalam kegiatan gerakan pemungutan sampah (GPS).</p>	<p><b>W (weakness)</b>                  Membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat</p>
<p><b>FAKTOR EKTERNAL</b></p> <p><b>O (opportunity)</b>                  Dukungan dari pihak ketua RT RW 10 dalam meingkatkan kinerja masyarakat dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS)</p>	<p><b>Strategi SO</b>                  Berkoordinasi penuh dengan pemerintah kelurahan , dinas kesehatan, dan sistem sumber lainnya untuk mendapat bantuan fasilitas tempat, dan media pelaksanaan kegiatan</p>	<p><b>Strategi WO</b>                  Melaksanakan kegiatan penyuluhan secara bertahap dengan metode pelaksanaan dalam ruangan dan luar ruangan agar lebih cepat dipahami masyarakat</p>
<p><b>T (threat)</b>                  Banyak masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti sosialisasi karena merasa tidak penting</p>	<p><b>Strategi ST</b>                  Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang dampak positif kegiatan ini melalui kader kesehatan lingkungan sehingga lebih dekat ke masyarakat</p>	<p><b>Strategi WT</b>                  Mengadakan sosialisasi dengan tambahan media audiovisual sehingga menarik minat masyarakat</p>

Dari analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan kegiatan sosialisasi peduli sampah layak dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada kekeuatan kegiatan ini yang sesuai dengan kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) yang kurang berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya kontribusi masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait peduli dengan sampah maka akan membangkitkan rasa kepedulian masyarakat agar turun ikut berkontribusi pada kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS).

Adapun indicator keberhasilan pada program ini yaitu;

1. Masyarakat lebih peduli dengan sampah
2. Kontribusi masyarakat lebih besar dalam mengikuti kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS)
3. Lingkungan di kelurahan sukapura akan menjadi lebih bersih

**h. Jadwal dan Langkah-Langkah**

Berikut jadwal dan langkah-langkah program kegiatan “SULISA (Sukapura Peduli Sampah)” yang dicantumkan dalam tabel berikut:

**Table 2.21 Jadwal dan Langkah – langkah Kegiatan SULISA**

No.	NAMA KEGIATAN	JUNI			JULI		
		Pelaksanaan Minggu Ke-					
		II	III	IV	I	II	III
1.	Pembentukan Tim Kerja pengawas dalam kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS)	V					
2.	Menyusun rencana kerja penyuluhan		V				
3.	Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kota bandung		V				
4.	Menyebarkan undangan pelaksanaan kegiatan kepada peserta		V				
5.	Menyiapkan media dan sarana prasarana yang akan digunakan			V			
6.	Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan peningkatan kesadaran tentang menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat			V			
7.	Peninjauan lokasi sehabis kegiatan Gerakan Pemungutan Sampah (GPS) telah selesai				V	V	
9.	Evaluasi kegiatan						V

## **E. Analisis Penanggulangan Bencana**

### **1. Gambaran Masalah**

Pohon tumbang adalah bencana alam yang terjadi secara alamiah dikarenakan hujan dan angin kencang membuat pohon – pohon yang sudah berumur tidak lagi kuat menompag angin yang kian besar, dan akhirnya menimpa sebuah rumah warga. Penyebab lain tumbangnya pohon karena beberapa macam, yakni pohon sudah berumur tua, pohon miring, batang pohon keropos atau dimakan rayap, batang dan cabangnya mengering, serta yang ditanam bukan dari biji.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengharap agar pemerintah Bersama masyarakat di tiap – tiap daerah itu segera melakukan upaya mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. BNPB juga mengimbau agar seluruh komponen yang ada di daerah agar memantau perkembangan cuaca dari BMKG dan melihat potensi kerawanan wilayah melalui inaRisk BNPB.

Pada hari sabtu, 25 Maret 2023 telah terjadi bencana alam yaitu pohon tumbang di kelurahan sukapura disebabkan oleh hujan dan angin kencang. Proses evakuasi pohon tumbang tersebut diproses selama satu harian penuh sehingga menyebabkan kemacetan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang dinilai belum efektifnya intervensi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) dalam menyelesaikan permasalahan pohon tumbang.



*Gambar 2.9 Situasi Saat Bencana Alam Pohon Tumbang Terjadi*



*Gambar 2.10 Pihak Polisi Mengamankan Situasi Lokasi Bencana Alam Pohon Tumbang*



*Gambar 2.11 Proses Evakuasi Pohon Tumbang yang dilakukan oleh DPKP*

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Kajian tentang bencana**

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) yang dikutip Wijayanto (2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Dalam menghadapi bencana, perlu dilakukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai aspek terkait, antara lain:

1. Pemetaan risiko bencana: Pemetaan risiko bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi lokasi dan wilayah yang rawan terhadap bencana. Pemetaan risiko dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menentukan strategi mitigasi bencana.
2. Penanganan darurat: Penanganan darurat bertujuan untuk memberikan bantuan segera kepada korban bencana dan meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Penanganan darurat meliputi evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, pemberian bantuan medis, dan lain sebagainya.
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi: Setelah bencana terjadi, penting untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar wilayah terdampak dapat pulih dan berfungsi kembali. Rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali infrastruktur, rumah, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.
4. Mitigasi bencana: Mitigasi bencana adalah tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak bencana. Mitigasi bencana meliputi pemetaan risiko bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan.
5. Pembangunan berkelanjutan: Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk membangun wilayah yang kuat dan tahan bencana dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

### **b. Kajian tentang Pohon Tumbang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pohon tumbang diartikan sebagai pohon yang roboh atau jatuh dari tempat tumbuhnya. Sedangkan Menurut Kurniawan dan Kusri (2016), pohon tumbang diartikan sebagai suatu kondisi dimana pohon tidak lagi dapat berdiri tegak atau roboh dari tempatnya tumbuh, baik akibat faktor alami seperti angin kencang atau badai, maupun faktor buatan seperti penebangan atau penggalan.

Dalam melakukan kajian tentang pohon tumbang, beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pemantauan kondisi pohon: Pohon yang rapuh atau sakit dapat menjadi pemicu terjadinya pohon tumbang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan kondisi pohon secara rutin dan melakukan perawatan yang tepat jika ditemukan kerusakan atau penyakit pada pohon.
2. enataan ruang hijau: Penataan ruang hijau dapat membantu mengurangi risiko pohon tumbang. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih jenis pohon yang sesuai dengan kondisi lingkungan, melakukan pemangkasan secara teratur, dan menanam pohon dengan jarak yang cukup antara satu pohon dengan pohon yang lain.
3. Sistem peringatan dini: Sistem peringatan dini dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya pohon tumbang. Sistem ini dapat berupa pemasangan sensor pada pohon atau penggunaan aplikasi teknologi yang dapat memberikan peringatan dini ketika kondisi pohon mengalami perubahan.
4. Penanganan pohon tumbang: Penanganan pohon tumbang harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya kerusakan lebih lanjut. Penanganan pohon tumbang dapat meliputi pemotongan pohon, pengangkatan pohon, dan pemindahan pohon ke tempat yang aman.

### **c. Kajian tentang penanggulangan bencana**

Bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Ben-cana memiliki pengertian yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut undang-undang tersebut, bencana dibagi menjadi tiga jenis yakni; 1). Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, badai dan kekeringan; 2). Bencana sosial karena ulah manusia seperti konflik, perang, serangan teroris, kegagalan teknologi dan hama penyakit; dan 3) Bencana campuran alam dab manusia yaitu banjir, kebakaran hutan dan kekurangan pangan (IDEP, 2007).

Dalam melakukan kajian tentang penanggulangan bencana, beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pemetaan daerah rawan bencana: Pemetaan daerah rawan bencana perlu dilakukan untuk mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di suatu daerah. Hal ini dapat membantu dalam menentukan jenis bencana yang harus diprioritaskan dalam penanggulangan bencana.
2. Pendidikan dan sosialisasi: Pendidikan dan sosialisasi mengenai bencana perlu diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan sosialisasi dapat meliputi pelatihan pertolongan pertama pada korban bencana, prosedur evakuasi, dan cara menghindari bahaya saat terjadi bencana.
3. Kesiapsiagaan: Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana perlu ditingkatkan, seperti dengan menyediakan alat pemadam kebakaran, peralatan pertolongan pertama, dan sarana transportasi untuk evakuasi. Kesiapsiagaan juga mencakup pembuatan rencana darurat, simulasi evakuasi, dan koordinasi antarlembaga dalam penanggulangan bencana.
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi: Setelah bencana terjadi, rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tindakan penting dalam penanggulangan bencana. Rehabilitasi meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, pemberian bantuan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, sedangkan rekonstruksi dilakukan untuk membangun kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak akibat bencana.

### **3. Assesmen**

#### **b. Identifikasi Masalah**

Sebelum mendapatkan isu atau masalah terkait Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan beserta anggota kelompok 6 lainnya pada tanggal 17 maret 2023 melakukan kegiatan MPA di kelurahan sukapura dengan tujuan agar mempermudah praktikan dalam menemukan isu terkait Analisis Penanggulangan bencana. Namun setelah dilakukan assessment terkait isu bencana di kelurahan sukapura praktikan belum menemukan isu yang sesuai untuk diambil.

Pada hari kamis tanggal 06 April 2023, praktikan melakukan assessment kembali untuk menemukan permasalahan bencana di kelurahan sukapura. Praktikan mendapatkan kasus bencana alam yang di jadi pada tanggal 25 maret 2023 di kelurahan sukapura yaitu pohon tumbang.

Sebelum menentukan prioritas masalah, praktikan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Pak Asep selaku ketua RW 10 Keurahan sukapura pada tanggal 06 April 2023

2. Observasi lapangan tempat kejadian bencana pohon tumbang 12 April 2023.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, didapatkan informasi bahwa masalah terkait analisis penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bencana alam pohon tumbang

Dari hasil wawancara yang praktikan lakukan dengan pak Asep selaku ketua RW 10 kelurahan sukapura mengatakan bahwa telah terjadi bencana alam baru-baru saja di kelurahan sukapura pada tanggal 25 maret 2023. Bencana alam yang terjadi dikarenakan angin yang sangat lebat dan kencang menyebabkan banyak pohon tumbang yang berjatuh.

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam situasi bencana alam menyebabkan potensi terjadinya resiko, hal ini dibuktikan dari pernyataan pak asep yang mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang masih tidak acuh ketika bencana alam pohon tumbang terjadi.

2. Intervensi pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) dinilai kurang efektif dalam mengeksekusi terjadinya pohon tumbang.

Dari hasil wawancara yang praktikan lakukan dengan pak Asep selaku ketua RW 10 di kelurahan sukapura mengatakan bahwa terjadinya bencana alam pohon tumbang, proses evakuasi bencana alam tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih pohon yang tumbang berada di pinggir jalan sehingga sangat membahayakan pengendara lewat dan proses evakuasi memakan waktu 1 harian penuh yang menyebabkan kemacetan.

**Berdasarkan hasil assessment, maka dapat diketahui bahwa :**

- 1) Penyebab Masalah

Penyebab permasalahan yang ada yaitu masyarakat belum mengetahui bagaimana mitigasi ketika bencana alam terjadi (Poin 1) lalu ditambah dengan masalah lainnya yaitu pihak stakeholder yang berwajib dalam berkontribusi dalam menangani kejadian bencana alam , dinilai masih kurang efektif karena masih belum mampu mengurangi resiko ketika terjadi bencana alam pohon tumbang (Poin 2).

- 2) Dampak Masalah

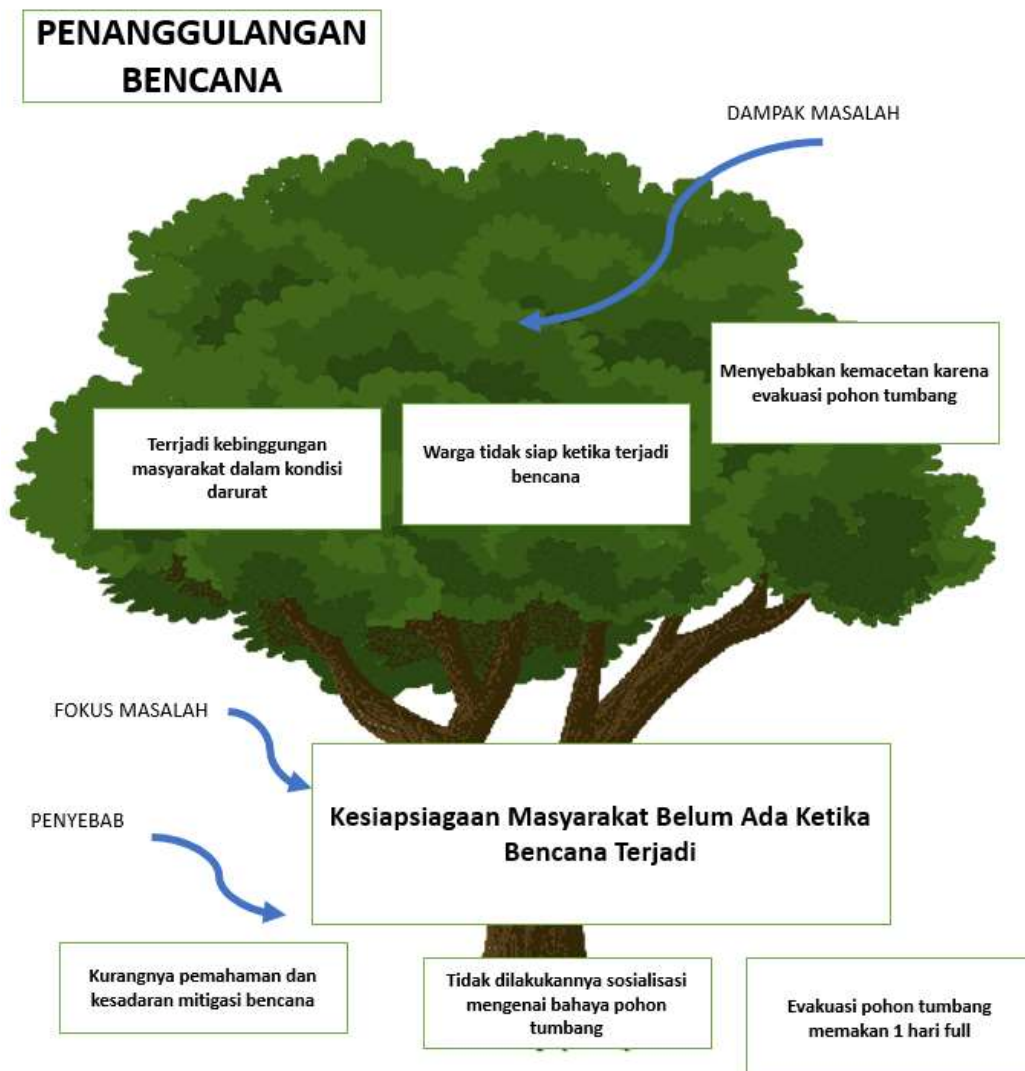
Dampak permasalahan yang ada yaitu tidak terbangunnya kemandirian masyarakat dalam menanggulangi bencana pada permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana pohon tumbang (Poin 1) lalu dampak lainnya adalah kurang efektifnya pihak dinas perumahan dan Kawasan pemukiman (DPKP) dalam menanggulangi bencana alam pohon tumbang dalam mengeksekusi pohon tumbang tersebut sehingga menyebabkan terjadinya

kemacetan (Poin 2). Jadi, dampak urgent untuk diselesaikan yaitu tidak terbangunnya kemandirian masyarakat dalam menanggulangi bencana serta kurang efekti intervensi pihak DPKP dalam menanggulangi bencana alam pohon tumbang.

### 3) Fokus Masalah

Melihat pada penyebab utama yaitu masyarakat belum mengetahui konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan dalam utama yaitu itdak terbangunnya kemandirian masyarakat dalam penaggulangan bencana, maka yang menjadi fokus masalah yaitu terkait dengan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penganggulangan bencana.

Adapun fokus masalah terkait melalui tools pohon masalah :



Gambar 2.12 Pohon Masalah terkait Analisis Penanggulangan Bencana

## **KETERANAGAN :**

Akar dalam pohon mengilustrasikan penyebab terjadinya permasalahan yang mana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan di daun sehingga berada di paling atas.

Berdasarkan analisis pohon masalah tersebut, yang menjadi fokus masalah yaitu terkait dengan Kesiapsiagaan Masyarakat Belum Ada Ketika Bencana Alam Terjadi di Kelurahan Sukapura. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan masalah ini, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman berada di wilayah rawan menjadikan masyarakat acuh terhadap kesiapsiagaan bencana. Akibatnya, ketika terjadi bencana masyarakat tidak siap hingga kebingungan untuk mengambil tindakan darurat. Dilihat juga dari pihak penanggulangan bencana yang belum mampu memberikan pelayanan yang sesuai, dapat dilihat dari proses evakuasi bencana alam pohon tumbang yang membutuhkan proses satu harian yang menyebabkan kemacetan.

Pihak yang berwajib dalam penanggulangan bencana juga menjadi penyebab mengapa belum adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana terjadi dikarenakan belum adanya pegerak yang mampu menyadarkan masyarakat pentingnya memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana.

### **c. Identifikasi Kebutuhan**

Dalam siklus manajemen bencana, menurut Carter (1991), kesiapsiagaan masuk dalam kategori pra bencana. Kesiapsiagaan ini muncul karena secara psikologis masyarakat pernah mengalami bencana serupa. Untuk memaksimalkan efektifitas edukasi kebencanaan, diperlukan program yang sifatnya komprehensif dalam jangka waktu tertentu. Bencana alam dan non-alam memiliki peluang tidak terdeteksi sebelum terjadi, maka dibutuhkan langkah – langkah preventif yang perlu dilakukan oleh kelurahan sukapura, atau daerah 0 daerah demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kelurahan sukapura merupakan salah satu wilayah di kecamatan kiaracandong, kota bandung yang memiliki wilayah banyak pepohonan yang tumbuh tinggi dan berada di pinggir jalan. Sepanjang musim hujan ataupun hujan deras biasa, acaman bencana pohon tumbang di menjadi semakin besar utamanya di Rukun Warga (Rw) 10. Jika tidak terdapat kesiapsiagaan yang baik, maka dampak yang akan terjadi akan semakin besar pula.

Berdasarkan analisis sebab dan akibat masalah di atas, maka kebutuhan yang diperlukan anatara lain:

- 1) Pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat RW
- 2) Pengevaluasi kepada pihak wajib yang menanggulangi bencana dalam proses evakuasi
- 3) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana

- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat terlibat dalam penanggulangan bencana.

#### **e. Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial**

##### **1. Sistem sumber informal**

Sistem sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu modal sosial masyarakat yang bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

##### **2. Sistem sumber formal**

Sistem sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu Tagana (Taruna Siaga Bencana)

##### **3. Sistem sumber kemasyarakatan**

Bentuk dari sistem sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu BPBD Kota Bandung dan DPKP Kelurahan Sukapura.

#### **4. Rencana Intervensi**

##### **a. Latar Belakang**

Kelurahan Sukapura merupakan salah satu kelurahan rawan terjadi pohon tumbang di Kecamatan Kiarasondong. Mengingat tingginya resiko hutan tumbang di Kelurahan Sukapura, maka harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan bencana. Namun selama ini, tindakan dalam usaha penanggulangan bencana hanya dilakukan oleh DPKP (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang pelaksanaannya hanya pemangkasan pohon tanpa adanya sosialisasi atau tindakan lainnya.

Pada saat menghadapi bencana, masyarakat yang belum mampu untuk menanganinya sendiri harus menunggu bantuan yang kadang-kadang tidak segera datang. Perlu disadari bahwa detik-detik pertama saat bencana terjadi adalah saat yang sangat penting dalam usaha mengurangi dampak bencana yang lebih besar. Didasari pemikiran tersebut dan sejalan dengan program pengembangan masyarakat yang mandiri, masyarakat sendiri perlu mengetahui secara menyeluruh semua upaya tindakan penanggulangan bencana supaya bisa segera mengambil tindakan yang tepat pada waktu bencana terjadi.

Maka dari itu dibutuhkan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sistem sumber informal berupa modal sosial masyarakat, sistem sumber formal berupa Tagana (Taruna Siaga Bencana), serta sistem sumber kemasyarakatan yaitu BPBD Kota Bandung. Dengan rangkaian kegiatan berupa penyadaran peran masyarakat dalam penanggulangan pohon

tumbang, diskusi, peningkatan kapasitas masyarakat terkait bencana banjir, dan pembentukan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB).

#### **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Tujuan umum yang akan diperoleh yaitu :

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana
2. Menjadikan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kemandirian dalam upaya penanggulangan bencana.
3. Memberikan wawasan terkait dengan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Tujuan Khusus yang akan diperoleh yaitu :

1. Agar masyarakat mengetahui semua langkah-langkah penanggulangan bencana sehingga dapat mengurangi ancaman, mengurangi dampak, menyiapkan diri secara tepat bila terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan diri, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.
2. Agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri dan berdaya tahan terhadap bencana.
3. Memperkuat kemampuan masyarakat untuk menanggulangi bencana.
4. Membangun kemampuan masyarakat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
5. Mengembangkan atau mengaktifkan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana di masyarakat.

#### **c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Berdasarkan hasil analisis masalah dan pemetaan potensi serta sistem sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan suatu kegiatan yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana di daerah rawan. Program kegiatan yang akan dilaksanakan ini berjudul “**Sukapura Sigap Bencana Pohon Tumbang**” Kegiatan ini berupa penyuluhan untuk menjelaskan pemetaan daerah rawan bencana di dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan dalam menghadapi bencana alam. Sosialisasi mitigasi bencana alam ini diadakan dengan mengundang narasumber untuk memaparkan kriteria ancaman bencana alam hingga tindakan mitigasi yang dapat dilakukan pada tahap pra bencana, darurat bencana, hingga pasca bencana.

Dalam kegiatan ini juga diadakan pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat RW 10 Kelurahan Sukapura. Tugas dan fungsi Kelompok Siaga Bencana (KSB) yaitu yang pertama sebagai pemeditasi yang bersifat kerelawanan, kemasyarakatan, yang kedua berfungsi hanya sebagai bentuk panggilan kemanusiaan. Disisi lain sebagai pencegahan dan kesiapsiagaan hingga pada saat

terjadi bencana. Setelah terjadi bencana Kelompok Siaga Bencana dapat bertugas mendata kemudian melaporkan kejadian bencana yang ada ke pemerintah desa maupun pihak BPBD Kota Bandung. Kelompok siaga nantinya akan beranggotakan masyarakat Kelurahan Sukapura yang ingin terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

#### d. Sistem Partisipan

Adapun sasaran program dalam pelaksanaan “**Sukapura Sigap Bencana Pohon Tumbang**” yang akan dilaksanakan di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung yaitu:

**Table 2.22 Sistem Partisipan Kegiatan Sukapura Siapsiaga Bencana**

No.	JENIS SISTEM	SISTEM REPRESNTATIF
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change agent system	Pekerja Sosial
3.	Client System	Masyarakat
4.	Support System	e) Pemerintah Kelurahan Sukapura f) Taruna Siaga Bencana g) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) h) BPBD Kota Bandung
5.	Contolling System	a) Pemerintah Kelurahan Sukapura b) Pekerja Sosial
6.	Implementing System	f) Pekerja sosial g) Karang Taruna h) Pemerintah kelurahan sukapura i) Taruna Siaga Bencana j) Masyarakat
7.	Target System	Masyarakat
8.	Action System	Pekerja Sosial

#### e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program “**Sukapura Sigap Bencana Pohon Tumbang**” yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization (Pengorganisasian Masyarakat) yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Kemudian, Community Development (Pengembangan Masyarakat) yaitu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui

pendayagunaan sumber-sumber yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta elemen penting lainnya. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui kelompok siaga bencana.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial adalah memberikan penerangan/penjelasan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang belum diketahui untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan ini diberikan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Desa Lembang tentang ancaman dan bahaya tinggal di wilayah rawan bencana alam.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Diperlukan**

Rencana intervensi yang ideal memerlukan rancangan anggaran yang baik serta mampu menutupi semua kebutuhan kegiatan intervensi. Untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan “Lembang Tahan dan Tanggap Bencana” berikut rancangan anggaran yang sudah disusun.

**Table 2.23 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Penyuluhan Sukapura Siapsiaga Bencana**

No.	Nama Item	Volume	Jenis Satuan	Harga @	Jumlah
1.	Print proposal	2	Buah	Rp.20.000	Rp. 40.000
2.	Print surat undangan	50	Buah	Rp. 150	Rp. 7.500
3.	Cetak banner	1x2.5	Meter	Rp.60.000	Rp.60.000
4.	ATK	1	Paket	Rp.35.000	Rp.35.000
5.	Honoratium narasumber	2	Orang	Rp.900.000	Rp.1.800.000
6.	Snack peserta	50	Paket	Rp.5.000	Rp.250.000
7.	Snack narasumber	2	Paket	Rp.20.000	Rp.40.000
8.	Makan siang narasumber	2	Buah	Rp.20.000	Rp.40.000
9.	Transpotasi narasumber	2	Orang	Rp.150.000	Rp.300.00
<b>TOTAL</b>					<b>Rp.2.572.00</b>

Bahan dan Alat yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut : (1) LCD Proyektor; (2) Layar Proyektor; (3) Laptop; (4) Buku; (5) Pulpen; (6) Meja; (7) Kursi; (8) Banner; (9) Wireless Speaker; (10) Microphone

**g. Analisis Kelayakan Program**

Analisis kelayakan program “**Sukapura Siapsiaga Bencana**” dilakukan untuk menilai seberapa mampu program yang dicanangkan dapat memecahkan masalah yang ada. Dalam hal ini metode analisis kelayakan yang digunakan dalam Program “**...**”. Analisis ini merupakan suatu penilaian manajemen mengenai Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

**Table 2.24 Analisi SWOT Program Sukapura Siapsiaga Bencana**

<p><b>Faktor Internal</b></p>	<p><b>S (strength)</b></p> <p>1. Program ini dapat dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kelurahan sukapura terhadap ancaman bencana di daerah rawan melalui pembentukan kelompok siaga bencana</p> <p>2. Pembentukan kelompok siaga bencana merupakan keinginan yang berasal dari masyarakat kelurahan sukapura</p>	<p><b>W (weakness)</b></p> <p>Program ini membutuhkan partisipasi masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi</p>
<p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p><b>O (opportunity)</b></p> <p>Dukungan yang besar dari pemerintah desa dan BPBD kota bandung agar masyarakat keluarga sukapura waspada serta memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana utamanya di daerah rawan</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>Berkoordinasi penuh dengan pemerintah desa dan BPBD Kota Bandung, dan sistem sumber lainnya agar mendapat bantuan fasilitas dan biaya untuk pelaksanaan kegiatan.</p>	<p><b>Strategi Wo</b></p> <p>Mengajak masyarakat yang potensial dan memiliki jiwa sosial tinggi melalui undangan personal untuk dapat mengikuti pembentukan kelompok siaga bencana.</p>
<p><b>T (threat)</b></p> <p>Masyarakat di luar wilayah rentan kurang tertarik untuk ikut terlibat dalam kegiatan peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana.</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>Memberikan penjelasan secara lengkap kepada masyarakat melalui RT masing-masing tentang dampak positif serta pentingnya pelaksanaan kegiatan ini sehingga mereka dapat ikut serta</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>Mengadakan doorprize atau hadiah tertentu untuk menarik minat masyarakat mengikuti kegiatan</p>

Dari analisis SWOT di atas, dapat disimpulkan kegiatan siapsiaga bencana pohon tumbang layak dilaksanakan. Hal ini didasarkan karena di kelurahan sukapura terdapat banyak pohon yang tumbuh di pinggir jalan serta sering terjadi angin lebat ketika hujan. Masyarakat akan lebih siapsiaga ketika bencana alam pohon tumbang terjadi dengan mengetahui ciri – ciri dan penyebab terjadinya pohon tumbang.

Adapun indikator keberhasilan pada program ini yaitu ;

1. Masyarakat dapat berkontribusi pada evasikasi pohon tumbang
2. Terhindar dari dampak buruh pohon tumbang

#### **h. Jadwal dan Langkah-Langkah**

Berikut jadwal dan langkah-langkah program kegiatan “Sukapura Siapsiaga Bencana” yang dicantumkan dalam tabel berikut:

**Table 2.25 Jadwal dan Langkah – langkah Kegiatan Sukapura Siapsiaga Bencana**

No.	Nama Kegiatan	Maret		April			
		Pelaksanaan Minggu Ke-					
		III	IV	I	II	III	IV
1.	Pembentukan Tim Kerja kegiatan yang terdiri dari Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, dan Pemerintah Desa	V					
2.	Menyusun rencana kerja penyuluhan dan pembentukan kelompok siaga bencana		V				
3.	Melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Bandung			V			
4.	Menyebarkan undangan kegiatan ke masyarakat dan sistem sumber lainnya			V			
5.	Menyiapkan media dan sarana prasarana yang akan digunakan				V		
6.	Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembentukan kelompok siaga bencana					V	
7.	Pelaksanaan penyuluhan secara langsung					V	
8.	Evaluasi kegiatan						V

### III . KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Kegiatan praktikum laboratorium sangat bermanfaat untuk praktikan dalam mengembangkan teknik – teknik yang sudah dipelajari sebelumnya. Praktikan mendapatkan pengalaman baru dalam praktek menemukan masalah atau isu terkait 5 Profil Lulusan Prodil Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Disini praktikan dapat menerapkan tahap-tahap intervensi komunitas dari inisiasi sosial sampai dengan perencanaan intervensi serta dapat menggunakan teknik , transect walk, wawancara, home visit dan community informal meeting. Hal ini menjadi pengalaman berharga bagi praktikan dalam berinteraksi dengan stakeholder maupun masyarakat dan sebagai modal kedepannya.

Adapun dalam kajian dalam praktikum ini terbagi menjadi 5 profil lulusan Perlindungan dan Pemberdayaan sosial yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Adapun isu beserta dengan rencana intervensi yang praktikan lakukan yaitu :

Dalam profil analis jaminan sosial, praktikan mengangkat isu tentang kurangnya angka partisipasi pekerja sektor informal terhadap program BPJS Kesehatan di kelurahan sukapura sehingga perlu dilakukan upaya sebuah intervensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Praktikan merencana intervensi sosialiasi BPJS Kesehatan PBI agar masyarakat dapat memahami bagaimana menjadi peserta Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) pada program BPJS Kesehatan.

Dalam profil analis sumber dana bantuan dana, praktikan mengangkat isu kebijakan penganggaran dana swadaya masyarakat belum terbagi secara merata sehingga menyebabkan dampak masalah baru seperti kurangnya kontribusi masyarakat dalam membayar iuran dana swadaya masyarakat. Diperlukan rencana intervensi untuk meyelesaikan masalah tersebut, praktikan membuat rencana intervensi penguatan pengeloaan dana swadaya masyarakat agar mampu dalam memahami bagaimana cara membuat rencana anggaran pengeluaran dan swadaya masyarakat.

Dalam profil analis pemberdayaan, praktikan mengangkat isu sumber daya masyarakat (SDM) di kelurahan sukapura kurang bisa bersaing di dunia pekerjaan dikarenakan tidak memiliki keahlian yang banyak dibutuhkan oleh home indutri yang banyak menggunakan jasa penjahit. Praktikan membuat rencana intervensi pemebrdayaan menjahit nagi masyarakat keluarahan sukapura.

Dalam profil analis penataan lingkungan sosial, praktikan mengangkat isu kurangnya partisipan masyarakat dalam kegiatan Gerakan Pemunugutan Sampah

(GPS) sehingga menyebabkan dampak kurang teralisasinya kegiatan gerakan pemugutan sampah (GPS). Praktikan menyusun rencana intervensi sosialisasi dalam bentuk penyuluhan Kadapa masyarakat bagaimana cara menjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

Dalam profil analisis penanggulangan bencana, praktikan mengangkat isu kurangnya kesiapsiagaan masyarakat ketika bencana alam berlangsung. Masalah ini perlu dikritisi dikarenakan bencana alam sulit untuk dideteksi sehingga praktikan memuat rencana intervensi berupa kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

## **B. Rekomendasi**

Praktikum laboratorium dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan dan membuat rencana intervensi terkait dengan 5 profil lulusan (Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana). Namun masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan untuk kegiatan-kegiatan praktikum selanjutnya.

### 1) Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Rekomendasi untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu :

Memerhatikan kebijakan untuk praktikan praktikum laboratorium sebelum kegiatan praktikum laboratorium dilaksanakan, agar mahasiswa dapat menyiapkan diri mereka sebelum menghadapi pelaksanaan praktikum laboratorium

### 2) Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Rekomendasi untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Yaitu :

Mengadakan pelatihan dalam membuat program terkhusus untuk Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dikarekan peluang kerja prodi lindsayasos merupakan perencana suatu program.

## SUMBER PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2021). *BPJS Kesehatan*.  
Diakses 11 April 2023 pukul 20:39 WIB <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2017/10/13/bpjs-kesehatan>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Mengenal Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan*  
Diakses 15 April 2023 pukul 14:21 WIB <https://www.kemkes.go.id>
- (BPJS) yang dapat diakses melalui situs web resmi DPR RI di alamat  
Diakses 11 April 2023 pukul 21:40 WIB  
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1645>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*  
Diakses 12 April 2023 pukul 05:40 WIB  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu040.pdf>
- Borotan, F. A. (2021). Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu manajemen keuangan masyarakat Desa Simaninggir Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Nidya Waras Sayekti dan Yunu Sudarwati. *Analisi Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*
- Solechan. (2019). *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
- Satarudin, Suprianto, Sujadi ( 2 September 2021). *Survey Pekerja Sektor informal Dan Sektor Formal Era Revolusi Industri di Kota Mataram*. (Unram)
- LINDA WIGE NINGRUM. (2020). *Pemantauan Pohon Beresiko Patah/Tumbang di Sepanjang Pagar Utara Kebun Raya Purwodadi*.
- Aritama. (2019). *Penanganan Bencana Pohon Tumbang dalam Konteks Manajemen Perkotaan di Kabupaten Badung*.
- Ninik Srijani. (--). *PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*. (Universitas PGRI Madiun)
- Achmad Fawaid1 , Erwin Fatmala. (2020). *HOME INDUSTRY SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DALAM MENINGKATKAN FINANCIAL REVENUES MASYARAKAT*. (Universitas Nurul Jadid).

Kartika Ratnaningtyas, Rediana Setiyani. (2017). *EFEKTIFITAS KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PENGAWAS MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH PADA SMA NEGERI SE-KOTA SEMARANG*. (Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia)